



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KAJIAN FISKAL REGIONAL



Triwulan I
2020

Penyusun:

Penanggung jawab: Bayu Andy Prasetya | Ketua Tim: Gunawan Supriyanto |

Editor: Fauzi Kurniawan

Anggota: Avviz Elfarij | Apri Sulisty Nugroho | Rima Rosita | Ida Puspita Ningtias



**KAJIAN FISKAL REGIONAL
PROVINSI MALUKU UTARA**

TRIWULAN I 2020



**KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
PROVINSI MALUKU UTARA**

Jl. Jati Lurus no. 254, Ternate 97716
telp : (0921) 3111178 fax : (0921) 3111179
website : www.djpbk.kemendagri.go.id/kanwil/malut



EXECUTIVE SUMMARY

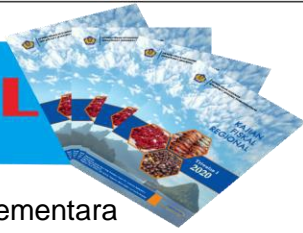
Perekonomian Maluku Utara triwulan I-2020 tumbuh 3,06 persen (*y-on-y*) atau lebih rendah jika dibandingkan dengan target RKPD sebesar 7,6-8,1 persen dan menurun jika dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan I-2019 sebesar 7,65 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha industry pengolahan yang tumbuh sebesar 10,97 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan Pertumbuhan (*y-o-y*) tertinggi terjadi pada Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Pertumbuhan PMTB yang cukup tinggi menunjukkan adanya Belanja Modal yang cukup besar di Maluku Utara. .

Inflasi tahun kalender sampai dengan triwulan I-2020 tercatat 0,86 persen, di atas inflasi tahun kalender nasional sebesar 0,76 persen. Kelompok Makanan, minuman dan tembakau menjadi komoditi penyumbang inflasi terbesar selama triwulan I-2020. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun 0,83 persen menjadi 4,26 persen dibanding periode sebelumnya atau belum mencapai target RPJMD sebesar 4,5 persen. Kenaikan tingkat pengangguran sejalan dengan angka kemiskinan yang juga meningkat. Tingkat kemiskinan di Maluku Utara meningkat menjadi 6,91 dari periode tahun lalu sebesar 6,62.

Realisasi penerimaan perpajakan mengalami peningkatan sampai dengan triwulan I-2020 sebesar Rp357,49 miliar dibanding periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp355,94 miliar. Dari sisi belanja, persentase realisasi Belanja Negara dan Transfer ke Daerah tercatat 20,36 persen atau turun dari realisasi pada periode yang sama tahun 2019 sebesar 24,22 persen. Realisasi penyaluran dana transfer dari pusat yang lebih lambat dibanding tahun lalu mengakibatkan penurunan realisasi belanja pemerintah pusat di daerah.

Pendapatan Daerah pada APBD lingkup Provinsi Maluku Utara yang bersumber dari Pendapatan Transfer tercatat sebesar Rp1,7 triliun atau turun dibanding periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp2 triliun. Sementara itu, Pendapatan Transfer mengalami penurunan sebesar 2,49 persen dibanding periode yang sama tahun 2019. Rasio penerimaan PAD terhadap total pendapatan masih tergolong rendah di level 3,17 persen. Salah satu penyebab rendahnya rasio penerimaan PAD terhadap total pendapatan daerah disebabkan belum optimalnya Pemerintah Daerah dalam memungut retribusi dan belum mampunya Pemda dalam mencari alternatif sumber penerimaan baru. Hal tersebut menunjukkan bahwa APBD di Maluku Utara masih bergantung pada transfer dari Pemerintah Pusat.

Dari sisi belanja, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp1,28 triliun atau 10,61 persen dari pagu. Dibanding periode yang sama tahun 2019, realisasi menurun Rp81 Miliar namun dalam persentase, realisasi belanja meningkat sekitar 0,04 persen dikarenakan pagu belanja 2020 lebih kecil dari pagu belanja 2019. Realisasi belanja daerah hingga triwulan I-2020 didominasi oleh belanja aparatur yang telah terserap sebesar 17,34 persen. Tingkat



penyerapan belanja tertinggi terdapat di Kota Ternate mencapai 14,47 persen. Sementara Kabupaten Pulau Taliabu menjadi daerah dengan tingkat penyerapan belanja paling rendah 6,28 persen. Sampai dengan akhir tahun, apabila Pemerintah Daerah membelanjakan anggarannya dengan pola yang sama seperti tahun sebelumnya, diprediksi belanja akan terealisasi sebesar 88,73 persen dari pagu.

Pendapatan Negara Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Daerah sampai dengan triwulan I-2020 tercatat Rp487,81 miliar atau lebih tinggi dari periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp473,47 miliar. Penerimaan perpajakan meningkat 6,74 persen dari periode yang sama tahun 2019. Penerimaan Perpajakan mendominasi pendapatan pemerintah konsolidasian sebesar 80,67 persen. Sedangkan PNBPN hanya memberikan kontribusi terhadap pendapatan pemerintah konsolidasian sebesar 19,33 persen.

Belanja konsolidasian triwulan I-2020 mengalami penurunan menjadi 5,43 persen dari periode yang sama tahun 2019. Beberapa belanja konsolidasian menurut fungsinya memiliki korelasi yang kuat dengan capaian indikator makro seperti Indeks Pembangunan Manusia.

Selama triwulan I-2020, rendahnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sering menjadi sorotan. Hal tersebut berimbas pada *fiscal sustainability* pemerintah daerah yang mengalami kerentanan terhadap kewajiban pemenuhan APBD sebagai fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Pandemi COVID-19 membuat adanya pembatasan bergerak dan berkegiatan yang cukup berdampak dalam upaya peningkatan penerimaan daerah.

Pemerintah Daerah harus berupaya meningkatkan kemandirian fiskalnya dengan mendorong sektor lain untuk menggerakkan ekonomi Maluku Utara. Pemerintah Daerah harus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi. Dari aspek regulasi, pemerintah daerah perlu memperbaiki aturan agar tidak terjadi tumpang tindih pengenaan tarif pajak daerah dan retribusi. Selain itu, seluruh Pemda di Maluku Utara harus bersinergi dengan pihak terkait dalam upaya penanggulangan Pandemi COVID-19 dan bersiap mengurangi dampak yang ditimbulkan Pandemi tersebut.



DAFTAR ISI

	<i>EXECUTIVE SUMMARY</i>	i
	DAFTAR ISI	iii
BAB I	PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL	1
	A Produk Domestik Regional Bruto	2
	B Inflasi	4
	C Indikator Kesejahteraan	6
BAB II	PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN	8
	A Pendapatan Negara	10
	B Belanja Negara	12
	C Prognosis Realisasi APBN	13
BAB III	PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD	14
	A Pendapatan Daerah	15
	B Belanja Daerah	18
	C Prognosis Realisasi APBD	19
BAB IV	PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)	20
	A Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian	20
	B Pendapatan Konsolidasian	20
	C Belanja Konsolidasian	23
BAB V	BERITA / ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH	26
	A Pembangunan Smelter Terhambat, Pertumbuhan Sektor Pertambangan Turun	26
	B Upaya Peningkatan Produktivitas Pangan	27



I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

Perekonomian Maluku Utara triwulan I-2020 tumbuh 3,06 persen (*y-on-y*), lebih rendah dibandingkan dengan target RPJMD Antara 7,6 sampai 8,1persen. Inflasi tahun kalender selama triwulan I-2020 masih terjaga pada level 0,86 persen dari target RPJMD sebesar 2 sampai 3,5 persen. Ekspor periode triwulan I belum memenuhi target untuk meningkat dari tahun sebelumnya. Ekspor tercatat 357 ribu ton atau setara dengan US\$130 juta. Sementara tingkat kemiskinan tercatat masih di atas 6 persen, sementara target yang tercantum di RKPD dibawah 6 persen.

Tabel 1.1 Perkembangan Ekonomi Makro Regional Provinsi Maluku Utara

Indikator	2018		2019		2020	
	RPJMD	Capaian Triw I	RPJMD	Capaian Triw I	RKPD	Capaian Triw I
Pertumbuhan Ekonomi (% <i>y-on-y</i>)	7,2	7,98	7,5	7,65	7,6-8,1	3,06
Inflasi (Tahun Kalender)	3,8	1,63	3,21	0,49	2-3,5	0,86
Ekspor (ribu ton)	33.872	2.041	36.749	2.250	meningkat	357
		US\$117 Juta		US\$169 Juta		US\$130 Juta
Pengangguran	4,36	4,65	4,13	5,09	4,5	4,26
Kemiskinan	4,14	6,64	3,44	6,62	<6,0	6,91

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, Bappeda Provinsi Maluku Utara (2020, diolah)

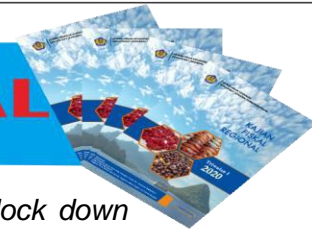
Secara Nasional, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I-2020 sebesar 2,97 persen year on year (*y-on-y*). Angka ini lebih rendah dari kuartal I-2019 sebesar 5,07 persen. Penurunan nilai pertumbuhan ekonomi kuartal I ini merupakan dampak pandemi virus COVID-19 sehingga ada pembatasan aktivitas dan *lockdown* di sejumlah negara, penurunan harga komoditas migas, terjadinya kontraksi perdagangan Indonesia dengan sejumlah mitra dagang.¹

Capaian pertumbuhan ekonomi triwulan I-2020 Provinsi Maluku Utara mengalami perlambatan dibanding pertumbuhan ekonomi triwulan I-2019 (*y-on-y*) sebesar 7,65 persen. Perlambatan tersebut sangat dipengaruhi pertumbuhan dari lapangan usaha pertambangan yang turun 6,22 persen (*y-on-y*). Beberapa perusahaan yang diharapkan sudah berproduksi, saat ini masih dalam tahap pengerjaan konstruksi pembangunan smelter baru.

Pertumbuhan ekonomi (*y-on-y*) yang mengalami kontraksi diikuti oleh inflasi tahun kalender pada level 0,86 persen. Adanya Pandemi COVID-19 yang diindikasikan mempengaruhi pendapatan masyarakat mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat sehingga menurunkan tingkat permintaan dari masyarakat sehingga inflasi relatif rendah.

Sementara itu, realisasi ekspor s.d triwulan I-2020 sebesar 357 ribu ton atau setara dengan US\$130 juta. Pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi kegiatan ekspor impor di

¹ <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5002809/waduh-ekonomi-ri-cuma-tumbuh-297-di-kuartal-i-2020#> diakses tanggal 6 Mei 2020

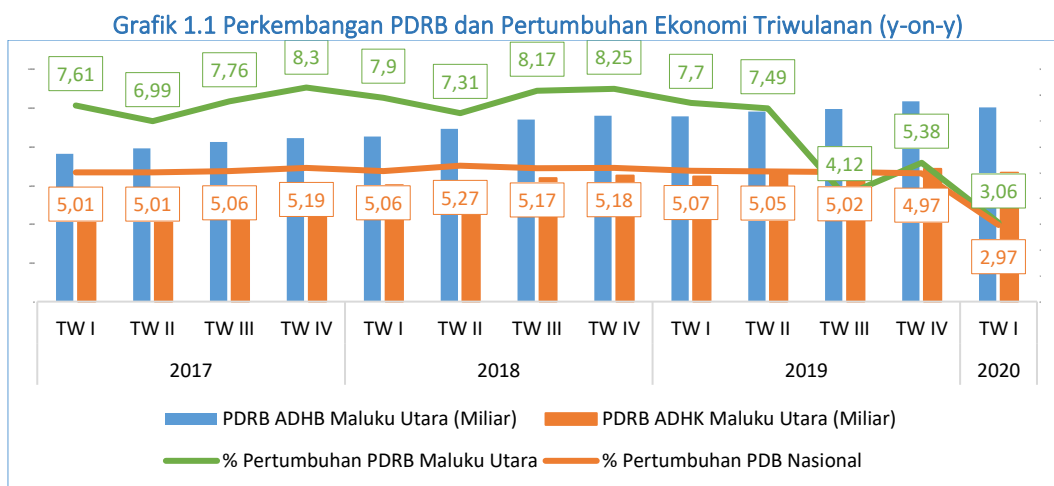


Indonesia umumnya dan Maluku Utara khususnya. Pembatasan kegiatan dan *lock down* pada negara-negara tujuan ekspor membuat penurunan nilai ekspor.

Melambatnya pertumbuhan ekonomi diikuti pula dengan peningkatan angka kemiskinan dan rendahnya kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja. Pertumbuhan triwulan I-2020 yang ditopang oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto belum mampu menyerap tenaga kerja yang erat kaitannya dengan investasi padat modal. Investasi khususnya padat karya diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap penyediaan lapangan kerja dan menurunkan angka kemiskinan. Untuk itu, Pemerintah Daerah diharapkan mampu mendorong investasi pada sektor padat karya dan penetapan kebijakan pembangunan inklusif.

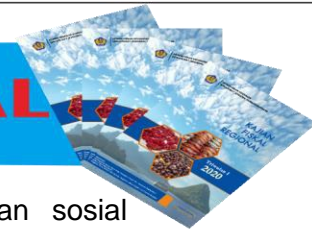
A. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Maluku Utara atas dasar harga berlaku (ADHB) pada triwulan I-2020 mencapai Rp10.040 miliar dan atas dasar harga konstan 2010 (ADHK) mencapai Rp6.671,3 miliar. Ekonomi Maluku Utara triwulan I-2020 tumbuh 3,06 persen dibanding triwulan I-2019 (*y-on-y*) tetapi mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan triwulan IV-2019 yang mencapai 5,38 persen. Perlambatan sangat dipengaruhi kontraksi pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang turun 20,22 persen, Konstruksi turun 7,01 persen, serta Administrasi Pemerintahan yang tercatat turun sebesar 5,65 persen.



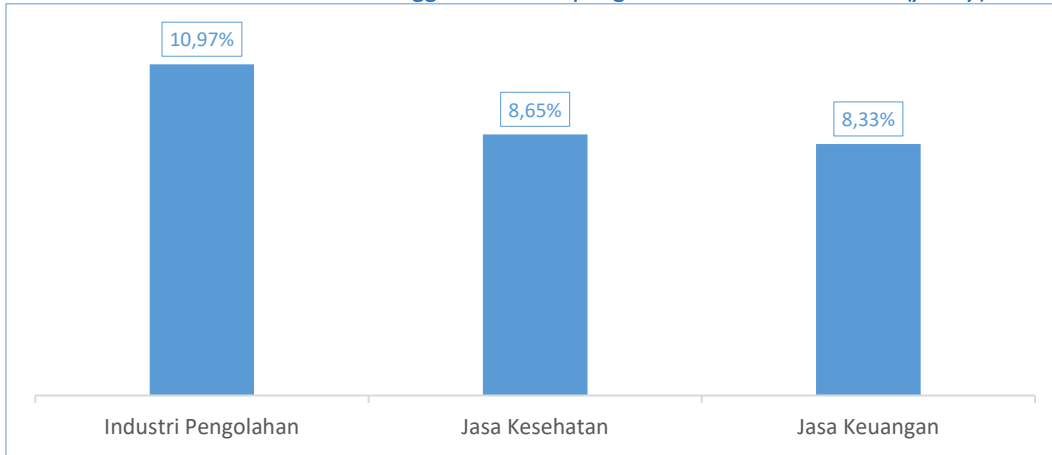
Sumber : BPS dan BPS Prov Malut, 2020 (diolah)

Untuk triwulan I-2020, pertumbuhan ekonomi turun menjadi sekitar 3 persen. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan *y-on-y* didukung oleh semua lapangan usaha, tertinggi pada Industri Pengolahan, Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial serta jasa Perantara keuangan. Pertumbuhan industri pengolahan ditopang oleh mulai berproduksinya smelter-smelter yang dibangun sebelumnya.



Pertumbuhan tinggi lainnya pada sektor Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial dimungkinkan karena adanya upaya penanganan Pandemi COVID-19.

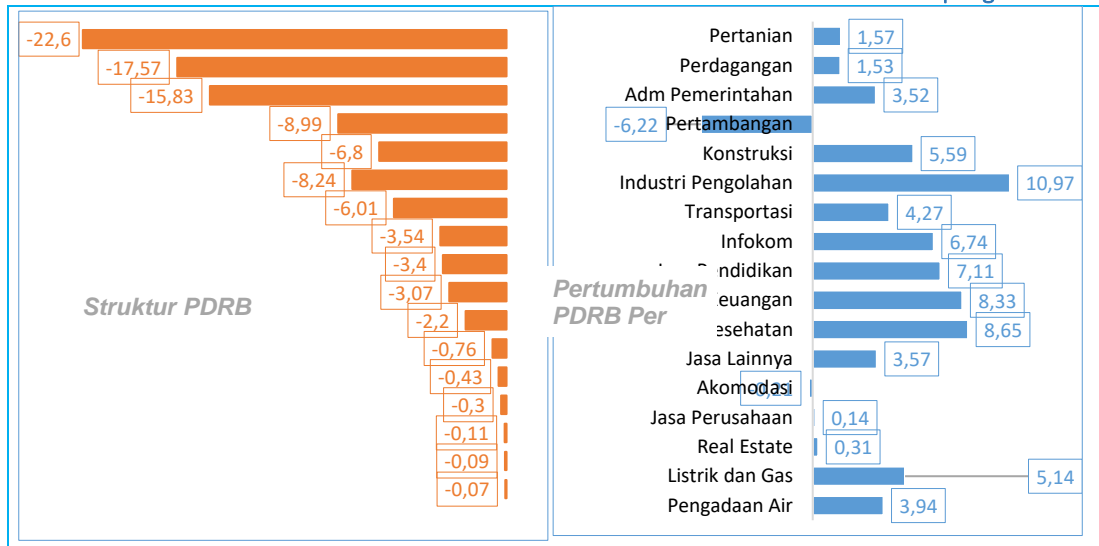
Grafik 1.2 Pertumbuhan Tertinggi menurut Lapangan Usaha Triwulan I-2020 (y-on-y)



Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2020 (diolah)

Dari sisi produksi, pertumbuhan triwulan I-2020 (y-on-y) didorong oleh hampir semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Industri Pengolahan 10,97 persen. Ini menunjukkan bahwa Industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi pada triwulan I-2020 sebesar 0,89 persen. Sedangkan dari struktur pembentuk PDRB triwulan I-2020, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menyumbang 67,06 persen.

Grafik 1.3 Struktur dan Pertumbuhan PDRB Triwulan I 2020 Maluku Utara menurut Lapangan Usaha

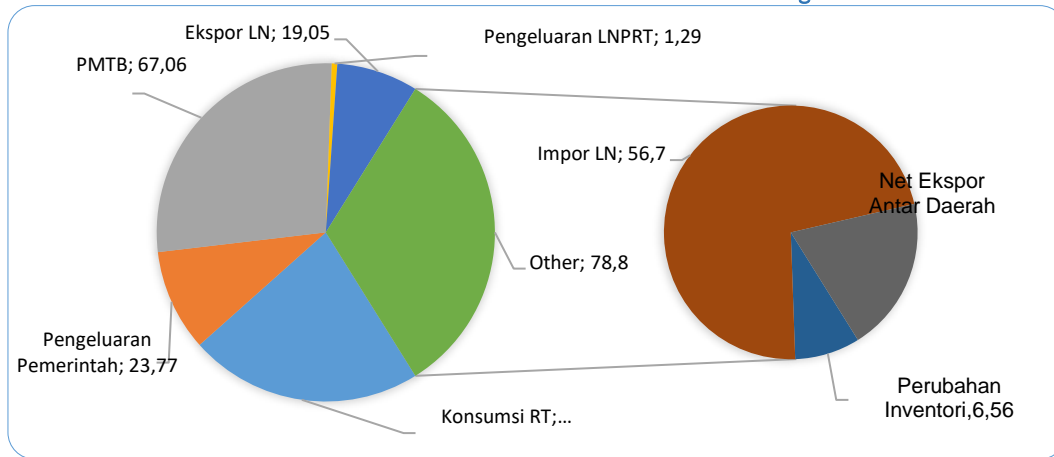


Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2020 (diolah)

Sementara itu, sektor Pertanian masih menjadi sektor yang memberikan kontribusi tertinggi pada struktur PDRB Maluku Utara sebesar 22,06 persen. Fundamental ekonomi regional akan lebih kuat apabila sumber pertumbuhan ditopang oleh lapangan usaha yang memberikan kontribusi tinggi terhadap pembentukan PDRB.



Grafik 1.4 Sumber Pertumbuhan PDRB menurut Jenis Pengeluaran



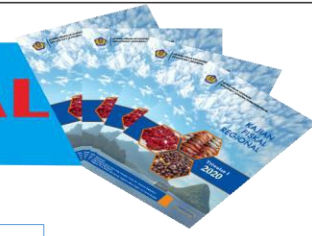
Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2020 (diolah)

Sumber pertumbuhan (*y-o-y*) tertinggi terjadi pada Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menunjukkan adanya Belanja Modal yang cukup besar di Maluku Utara. Berdasarkan struktur pembentukan PDRB, Konsumsi Rumah Tangga masih menjadi penopang utama PDRB Maluku Utara. Dalam struktur PDRB, Net ekspor daerah Maluku Utara yang masih bernilai negatif memberi andil pada sumber pertumbuhan. Rendahnya net ekspor antar daerah menunjukkan bahwa perekonomian Maluku Utara sangat bergantung kepada pasokan produk dan jasa dari luar daerah.

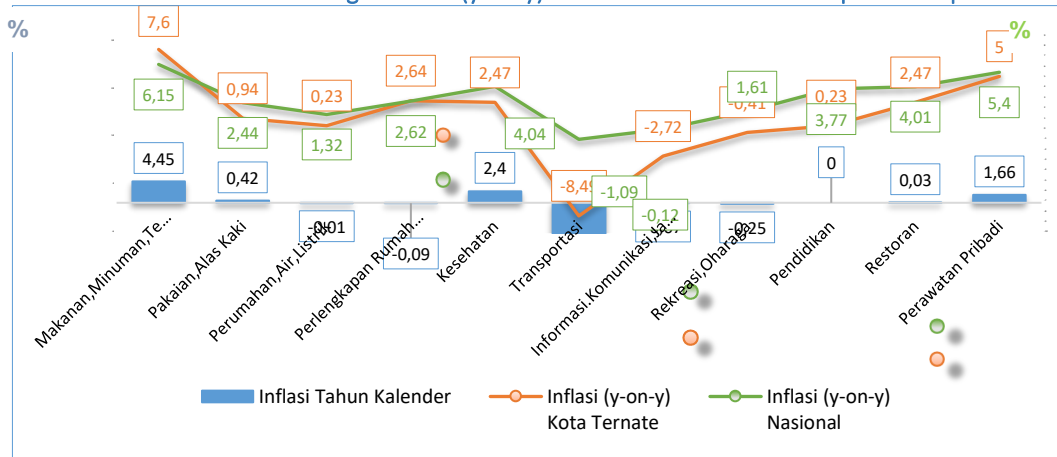
B. Inflasi

Inflasi di Maluku Utara hanya diwakili oleh Kota Ternate karena penjelasan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Utara, Kabupaten dan Kota selain Kota Ternate belum representatif untuk dijadikan sampel pengukuran kota inflasi. Dengan demikian sampai saat ini seluruh kajian mengenai inflasi di Maluku Utara yang menggunakan data BPS, pengukurannya hanya akan diwakili oleh Kota Ternate.

Sampai dengan triwulan I-2020, Provinsi Maluku Utara yang diwakili oleh Kota Ternate mengalami inflasi sebesar 2,09 persen (*y-on-y*) atau di bawah inflasi nasional sebesar 2,96 persen (*y-on-y*). Sementara inflasi tahun kalender sampai dengan triwulan I-2020 sebesar 0,86 persen. Inflasi bulanan selama triwulan I-2020 tertinggi terjadi pada bulan Februari 2020 sebesar 1,34 persen.



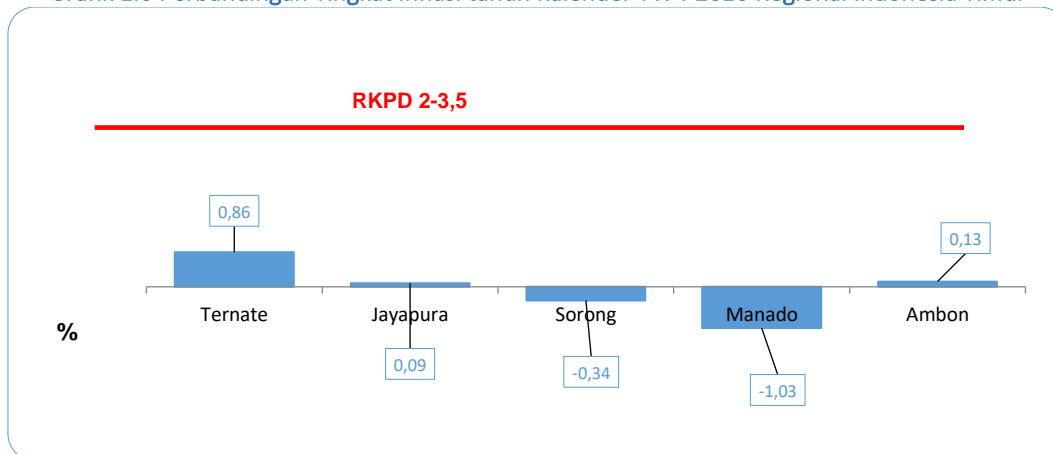
Grifik 1.5 Perkembangan Inflasi (y-on-y) dan Inflasi Tahun Kalender per Kelompok



Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2020 (diolah)

Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahun kalender sampai dengan triwulan I-2020 terjadi di hampir seluruh kelompok pengeluaran. Penyumbang inflasi terbesar terjadi pada kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau yang mencatatkan inflasi sebesar 7,60 persen. Kelompok lainnya yang menyumbang inflasi selama triwulan I-2020 ialah Perlengkapan Rumah Tangga, Kesehatan, Restoran. Ketergantungan pasokan dari luar daerah, turut menyebabkan tingginya inflasi pada kelompok tersebut. Faktor lainnya ialah adanya Pandemi COVID-19 yang diindikasikan mempengaruhi inflasi pada kelompok seperti kesehatan, penyedia makanan (restoran).

Grifik 1.6 Perbandingan Tingkat Inflasi tahun Kalender TW I-2020 Regional Indonesia Timur



Sumber: Bappeda Provinsi Maluku Utara dan BPS Provinsi Maluku, 2020 (diolah)

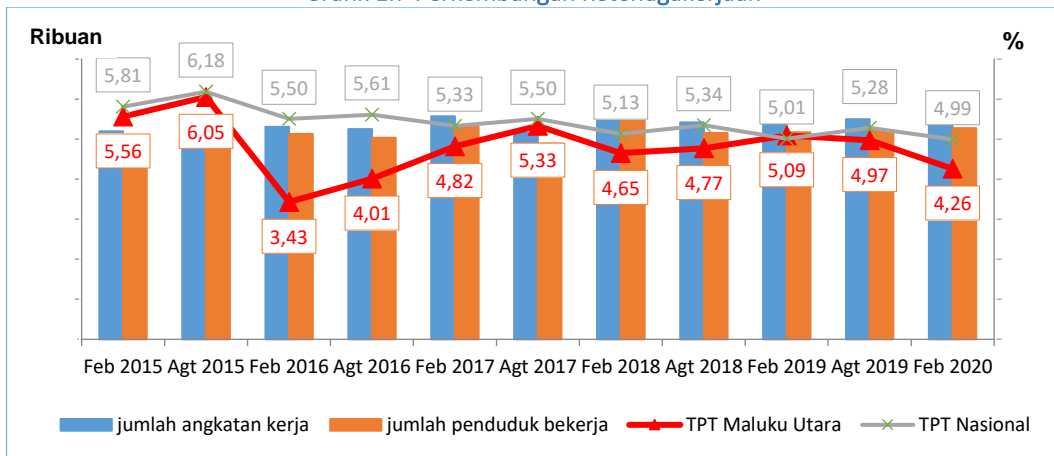
Inflasi di Kota Ternate tergolong rendah dan di bawah target yang ditetapkan RKPD 2020. Meskipun angka inflasi relatif terkendali, tetapi ketergantungan terhadap barang dan jasa dari luar daerah yang ditunjukkan rendahnya net ekspor antar daerah, harus menjadi perhatian. Pemerintah daerah dan Tim Pengendali Inflasi Daerah harus mengambil langkah antisipasi pengendalian inflasi Daerah. Salah satunya melalui stimulus terhadap pelaku usaha yang menghasilkan produk bahan makanan seperti komoditi pertanian dan hortikultura yang selama ini dipasok dari daerah lain.



C. Indikator Kesejahteraan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Maluku Utara per Februari 2020 tercatat sebesar 4,26 persen atau turun 0,83 persen dibanding TPT Februari 2019. Angkatan kerja per Februari 2020 sebanyak 550,2 ribu orang atau naik sebanyak 5,3 ribu orang dibandingkan Februari 2019 (544,9 ribu orang). Untuk Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Februari 2020 tercatat sebesar 63,88 persen, turun 0,92 persen poin dibanding Februari 2019. Angka ini menunjukkan bahwa sebanyak 63,88 persen penduduk Maluku Utara yang berusia 15 tahun ke atas aktif dalam kegiatan ekonomi. Sedangkan 36,12 persen sisanya melakukan kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga, maupun kegiatan lain yang bukan kegiatan ekonomi.

Grafik 1.7 Perkembangan Ketenagakerjaan



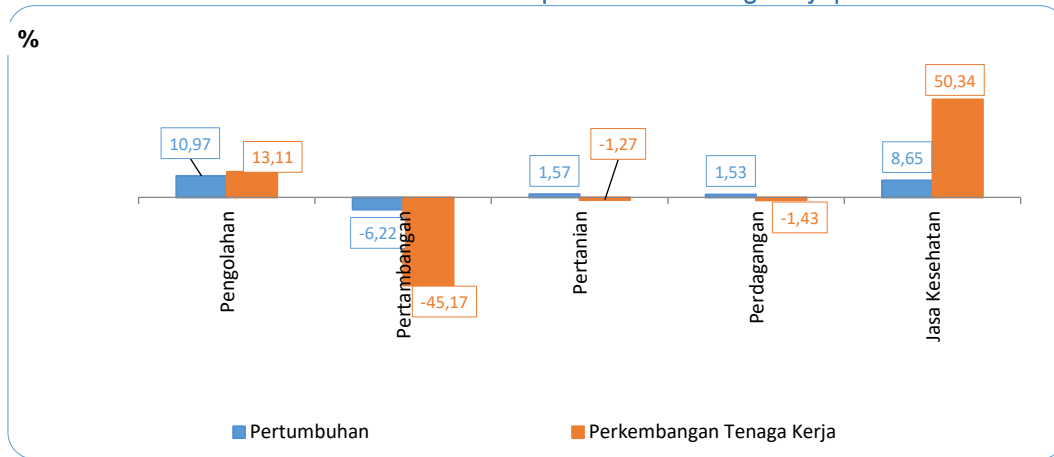
Sumber: BPS dan BPS Provinsi Maluku, 2020 (diolah)

Jika melihat kenaikan jumlah penduduk bekerja yang lebih tinggi daripada kenaikan jumlah angkatan kerja pada periode Agustus 2019 sampai Februari 2020 terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja. Sektor industri pengolahan, kesehatan dan jasa keuangan mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Seperti ditunjukkan pada grafik 1.8, sektor pertanian yang merupakan sektor terbesar dalam struktur PDRB Maluku Utara mengalami penurunan jumlah tenaga kerja pada periode antara Februari 2019 dan Februari 2020. Kontraksi pertumbuhan pada sektor pertambangan berakibat penurunan jumlah tenaga kerja sebesar 45,17 persen pada periode yang sama. Sedangkan sektor jasa kesehatan yang mengalami kenaikan pertumbuhan, menghasilkan perkembangan tenaga kerja pada periode antara Februari 2019 dan Februari 2020.



Grafik 1.8 Pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan tenaga kerja per sektor

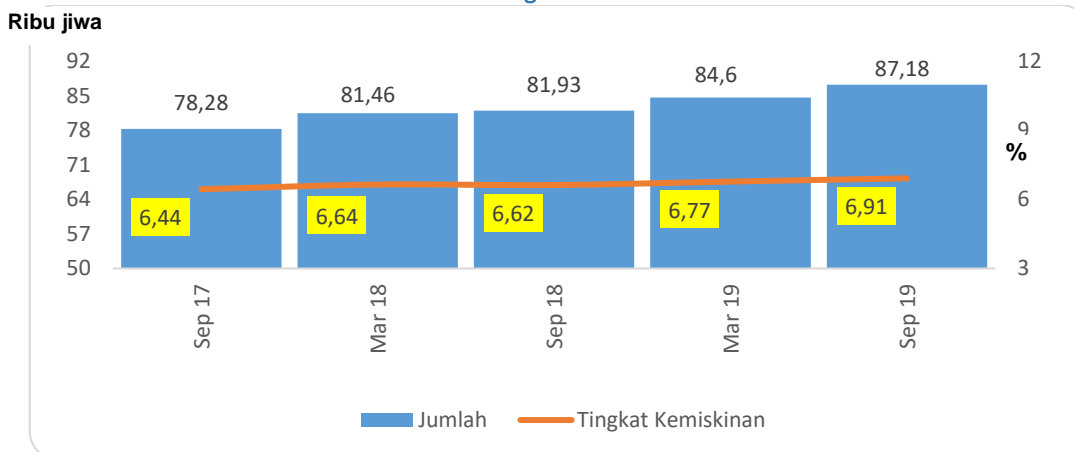


Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2020 (diolah)

Pemerintah Daerah harus memperhatikan penurunan jumlah tenaga kerja sektor pertanian mengingat sektor pertanian merupakan sektor unggulan yang berkontribusi terbesar pada penciptaan PDRB. Apabila sektor pertanian tumbuh dan menyerap tenaga kerja dengan jumlah besar, maka fundamental perekonomian Maluku Utara akan semakin kokoh dan stabil.

Kemiskinan di Maluku Utara naik menjadi 6,91 persen dibanding periode sebelumnya di kisaran 6,77 persen. Angka kemiskinan sejak dua tahun terakhir mengalami tren meningkat. Faktor-faktor penyebab kenaikan tingkat kemiskinan adalah rendahnya nilai tukar petani (NTP) dan inflasi selama periode semester II-2018 hingga triwulan IV-2019.

Grafik 1.9 Perkembangan kemiskinan Maluku Utara



Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2020 (diolah)

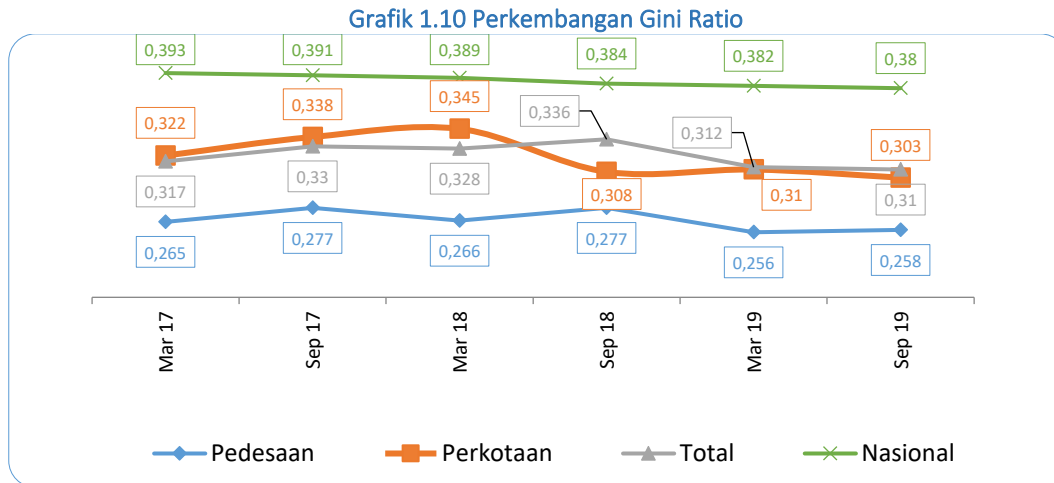
Pembangunan desa berbasis dana desa oleh pemerintah desa harus difokuskan untuk program/kegiatan yang menstimulasi berkurangnya angka kemiskinan. Pemerintah Daerah juga perlu mengevaluasi program-program yang telah dilaksanakan, meliputi pengendalian inflasi daerah pembangunan sektor pertanian dan perkebunan.

Sementara itu, tren ketimpangan pengeluaran yang diukur dengan *gini ratio* menunjukkan arah yang berlawanan dengan tren kemiskinan. Ketimpangan pengeluaran Maluku Utara turun hingga 2 basis poin menjadi 0,310 atau tergolong ke dalam kategori



rendah. Angka ketimpangan di perdesaan yang menurun 7 basis poin sedangkan perkotaan naik tipis 2 basis poin.

Gini Ratio di Maluku Utara merupakan yang terendah keempat dari 34 Provinsi di Indonesia. Distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah tercatat sebesar 21,68 persen termasuk pada kategori ketimpangan rendah. Pemanfaatan dana desa yang dipercepat sejak awal tahun dan optimalisasi penggunaannya untuk program padat karya berpengaruh pada turunnya ketimpangan di Perdesaan.



Sumber: BPS dan BPS Provinsi Maluku, 2020 (diolah)

II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN

Pendapatan negara di Provinsi Maluku Utara triwulan I tahun 2020 terealisasi sebesar Rp430,42 miliar. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp8,30 miliar atau 1,97 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp422,13 miliar. Belanja negara triwulan I tahun 2020 terealisasi sebesar Rp2.830,72 miliar atau mengalami penurunan sebesar Rp931,26 miliar (24,75 persen) dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp3.761,98 miliar.

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan triwulan I tahun 2020 sebesar Rp357,49 miliar atau 17,44 persen dari target tahun 2020, sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi sebesar Rp72,94 miliar atau 35,85 persen dari pagu tahun 2020. Adapun untuk semua jenis belanja pemerintah pusat mengalami penurunan dibanding periode yang sama tahun 2019.

Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp290,42 miliar atau 19,18 persen dari pagu dan mengalami penurunan 36,98 persen dibandingkan triwulan I tahun 2019. Belanja tersebut menjadi pos belanja tertinggi dalam penyerapan anggaran pada triwulan I tahun 2020. Belanja barang terealisasi sebesar Rp257,60 miliar atau 15,57 persen dari pagu mengalami penurunan terbesar dibandingkan dengan jenis belanja yang lain yakni 49,21 persen.



Tabel 2.1 Pagu dan Realisasi APBN Provinsi Maluku Utara Triwulan I Tahun 2019 dan 2020 (miliar rupiah)

Uraian	Triwulan I-2019			Triwulan I-2020		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
A. PENDAPATAN NEGARA	2.257,35	422,13	18,70	2.253,82	430,42	19,10
I. PENERIMAAN DALAM NEGERI	2.257,35	422,13	18,70	2.253,82	430,42	19,10
1. Penerimaan Pajak	2.117,10	355,94	16,81	2.050,37	357,49	17,44
2. PNPB	140,25	66,19	47,19	203,46	72,94	35,85
II. HIBAH	-	-	-	-	-	-
B. BELANJA NEGARA	15.535,34	3.761,98	24,22	13.903,22	2.830,72	20,36
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	4.739,10	1.139,33	24,04	4.636,92	708,74	15,28
1. Belanja Pegawai	1.234,23	460,84	37,34	1.514,09	290,42	19,18
2. Belanja Barang	1.819,19	507,21	27,88	1.654,22	257,60	15,57
3. Belanja Modal	1.672,33	168,62	10,08	1.458,78	158,97	10,90
4. Belanja Bantuan Sosial	13,35	2,66	19,93	9,83	1,75	17,76
5. Belanja Lain-lain	-	-	-	-	-	-
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	10.796,24	2.622,65	24,29	9.266,30	2.121,98	22,90
1. Transfer ke Daerah	9.904,64	2.457,12	24,81	8.344,42	2.018,46	24,19
a. Dana Perimbangan	9.764,99	2.387,29	24,45	8.344,42	2.018,46	24,19
1) Dana Alokasi Umum	6.548,96	2.167,16	33,09	5.984,68	1.696,46	28,35
2) Dana Bagi Hasil	482,75	79,80	16,53	352,78	44,05	12,49
3) Dana Alokasi Khusus	2.733,28	140,33	5,13	2.006,96	277,96	13,85
b. Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-
c. Dana Keistimewaan Yogyakarta	-	-	-	-	-	-
d. Dana Transfer Lainnya (DID)	139,65	69,83	50,00	-	-	-
2. Dana Desa	891,60	165,53	18,57	921,88	103,52	11,23
C. SURPLUS/DEFISIT	-13.277,99	-3.339,85	25,15	-11.649,40	-2.400,30	20,60

Sumber: LKPP-TW Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara, 2020 (diolah)

Penyaluran belanja transfer ke daerah dan dana desa pada periode sampai dengan triwulan I tahun 2020 lebih rendah dibanding tahun 2019, baik secara nominal maupun persentase. Hal tersebut antara lain akibat perubahan kebijakan penyaluran transfer ke daerah dan dana desa sebagai imbas adanya pandemi Covid-19. Selain itu, hasil monitoring dan evaluasi oleh Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara dengan KPPN Ternate dan KPPN Tobelo mengindikasikan bahwa terdapat keterlambatan pemerintah daerah dalam pemenuhan persyaratan pencairan dana transfer.

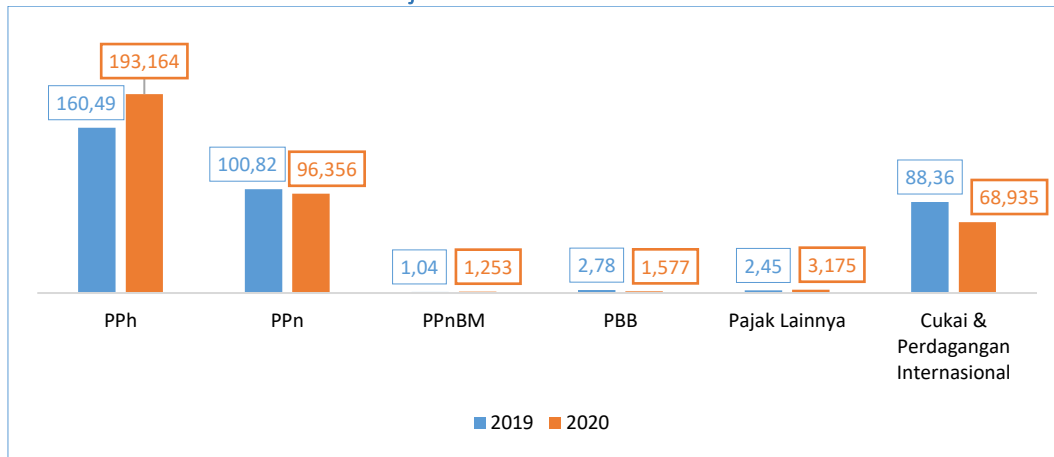


A. Pendapatan Negara

1. Penerimaan Perpajakan

Penerimaan perpajakan di Provinsi Maluku Utara selama triwulan I tahun 2020 mencapai Rp357,49 miliar mengalami peningkatan sebesar Rp1,55 miliar dibanding periode yang sama tahun 2019. Pajak penghasilan memiliki komposisi penerimaan perpajakan paling besar mencapai 52,48 persen dari total penerimaan perpajakan.

Grafik 2.1 Realisasi Penerimaan Pajak Triwulan I Tahun 2019 dan 2020 Provinsi Maluku Utara



Sumber: KPP Pratama Ternate dan Tobelo, KPPBC TMP C Ternate, 2020 (diolah)

Penerimaan perpajakan triwulan I tahun 2020 Provinsi Maluku Utara mengalami beberapa kendala seperti kondisi geografis dan luas wilayah kabupaten dan kota yang sulit untuk dijangkau. Jaringan komunikasi yang terbatas serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak juga menjadi penghambat penerimaan perpajakan yang ada. Adanya pandemi Covid-19 juga mengakibatkan perekonomian di Provinsi Maluku Utara mengalami penurunan yang berdampak penerimaan perpajakan.

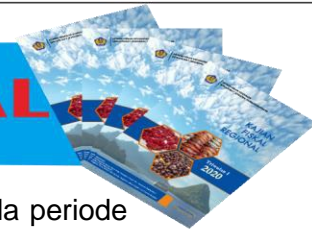
Berbagai upaya dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan seperti pemberian edukasi dan pembelajaran kepada masyarakat melalui *Tax Go To School / Campus*. Membuka pojok pajak dan layanan pos bantuan pajak perlu dilakukan di wilayah yang strategis sehingga memudahkan wajib pajak untuk melakukan setoran pajak. Kerjasama dengan pemerintah juga harus dilakukan untuk mendorong bendahara taat pajak.

a) Pajak Penghasilan (PPh)

Penerimaan PPh selama triwulan I tahun 2020 sebesar Rp193,164 miliar lebih tinggi 20,36 persen dibanding realisasi periode yang sama tahun 2019. Kenaikan PPh tersebut sejalan dengan peningkatan jumlah wajib pajak menjadi 188.547 di tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah penduduk yang bekerja terutama pekerja formal mengalami peningkatan.

b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Penerimaan PPN selama triwulan I tahun 2020 sebesar Rp96,356 miliar lebih rendah Rp4,464 miliar dari periode yang sama tahun 2019. Penurunan ini diindikasikan terjadi karena



penerimaan PPN dalam negeri, impor dan lainnya menurun. Penurunan PPN pada periode triwulan I tahun 2020 terjadi seiring pertumbuhan ekonomi (*y-on-y*) triwulan I tahun 2020 Provinsi Maluku Utara yang menurun menjadi 3,06 persen dengan tingkat inflasi (tahun kalender) pada level 0,86 persen.

c) Pajak Bumi dan Bangunan

Penerimaan PBB sebesar Rp1,577 miliar sampai dengan triwulan I tahun 2020 terdiri dari PBB Pertambangan Mineral dan Batubara serta PBB Kehutanan. PBB jenis ini sebagian terbesar disumbang dari sektor pertambangan emas. Penerimaan PBB terpusat di Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Pulau Taliabu.

d) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Penerimaan PPnBM (MAP 41122x) selama triwulan I tahun 2020 sebesar Rp1,253 miliar, lebih tinggi 20,48 persen dibanding periode yang sama tahun 2019. Penerimaan PPnBM terpusat di Kabupaten Halmahera Tengah, Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Utara. Peningkatan ini sejalan dengan penerimaan PPnBM dalam negeri dan PPnBM lainnya yang mengalami kenaikan.

e) Penerimaan Cukai dan Pajak Perdagangan Internasional

Penerimaan dari cukai dan pajak perdagangan internasional mencapai Rp68,935 miliar. Penerimaan ini terdiri dari bea masuk, denda administrasi pabean dan bea masuk anti dumping dimana 99,93 persen berupa bea masuk. Penerimaan cukai dan pajak perdagangan internasional triwulan I tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 21,98 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019. Penurunan ini diindikasikan karena belum adanya produsen barang kena cukai yang beroperasi di wilayah KPPBC TMP C Ternate. Selain itu, sebagian barang yang diimpor menggunakan fasilitas pembebasan bea masuk. Sedangkan untuk mengoptimalkan penerimaan cukai dan pajak perdagangan internasional telah dilakukan dengan intensifikasi penelitian dokumen.

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi PNBPNP triwulan I tahun 2020 mencapai Rp72,94 miliar. Seluruh PNBPNP yang diterima merupakan Pendapatan PNBPNP Lainnya (425xxx). Ketiadaan penerimaan PNBPNP dari sumber daya alam (SDA) terjadi karena PNBPNP SDA disetor dan dicatat sebagai penerimaan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Penerimaan PNBPNP di Provinsi Maluku Utara didominasi oleh Pendapatan Uang Pendidikan (425412) serta Pendapatan Jasa Kebandarudaraan (425516) dan Kepelabuhanan (425513).

a) Penerimaan Pendapatan Uang Pendidikan

Pendapatan Biaya Pendidikan triwulan I tahun 2020 mencapai Rp33,379 miliar. Penerimaan tersebut lebih tinggi Rp9,147 miliar dibanding periode yang sama tahun 2019.



Tren Pendapatan Uang Pendidikan pada umumnya mengalami peningkatan di triwulan I dan triwulan III dikarenakan adanya pembayaran uang semester kuliah pada bulan Februari dan Agustus.

b) Pendapatan Jasa Kepelabuhanan dan Jasa Kebandarudaraan

Pendapatan Jasa Kepelabuhanan dan Kebandarudaraan triwulan I tahun 2020 sebesar Rp10,809 miliar. Pendapatan ini meningkat di periode yang sama tahun 2019. Hal ini sejalan dengan aktivitas bandar udara yang terkonsentrasi di Ternate, dan pelabuhan yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Maluku Utara.

3. Pendapatan Hibah

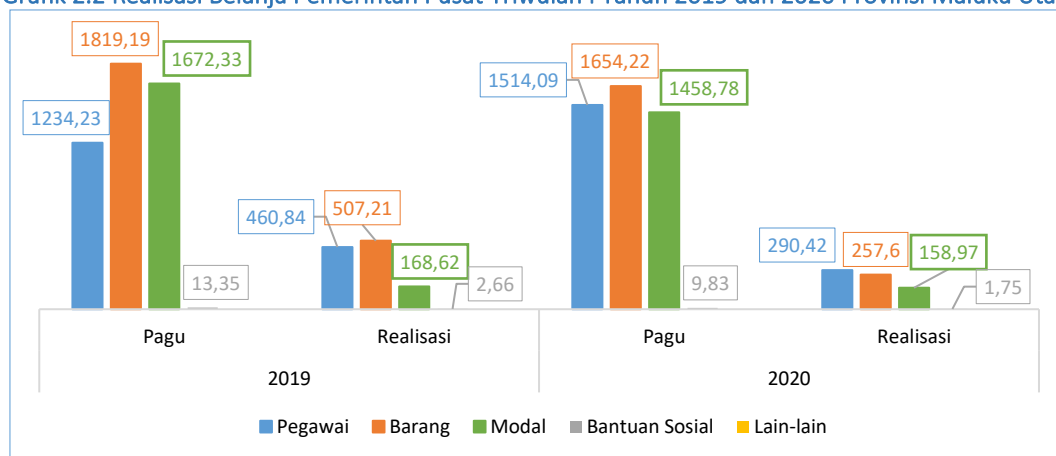
Tidak terdapat pendapatan hibah yang dicatat di Provinsi Maluku Utara pada triwulan I tahun 2020. Hibah yang diterima instansi pemerintah pusat tercatat sebagai pendapatan Bendahara Umum Negara (DJPPR).

B. Belanja Negara

1. Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi belanja pemerintah pusat di Provinsi Maluku Utara triwulan I tahun 2020 sebesar Rp708,74 miliar atau turun 37,79 persen dibanding periode yang sama tahun 2019. Penurunan tertinggi terjadi pada belanja barang yang mencapai 49,21 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu realisasi belanja modal mengalami penurunan terkecil sebesar 5,72 persen dibanding periode yang sama tahun 2019. Terdapat diindikasikan proses pekerjaan yang sedang berjalan namun belum direalisasikan keuangannya. Penyebab lainnya karena kebijakan Covid-19 yang mulai digalakkan sejak awal bulan Maret tahun 2020 dengan adanya pembatasan pencairan dana dalam rangka *refocussing* dan *realokasi* anggaran.

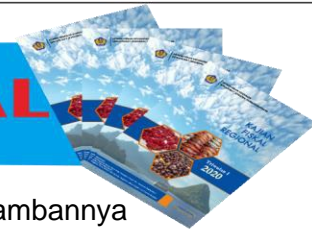
Grafik 2.2 Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Triwulan I Tahun 2019 dan 2020 Provinsi Maluku Utara



Sumber : LKPP-TW Kanwil DJPb Prov. Maluku Utara, 2020 (diolah)

2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Transfer ke daerah dan dana desa triwulan I tahun 2020 mencapai Rp2.121,98 miliar turun 19,09 persen dibanding tahun 2019. Penurunan ini untuk komponen dana alokasi umum, dana bagi hasil dan dana desa. Penurunan dana desa diindikasikan adanya



perubahan mekanisme penyaluran per pemda menjadi per desa karena lambannya pemerintah daerah dalam melengkapi dokumen persyaratan penyaluran seperti Peraturan Daerah mengenai APBDDes dan masih adanya Rekening Kas Desa (RKD) yang belum valid. Sementara itu, untuk dana alokasi khusus fisik dan non fisik mengalami kenaikan sebesar 98,07 persen dari tahun lalu.

3. Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU)

Universitas Khairun Ternate menjadi BLU pertama di Provinsi Maluku Utara. Unkhair dari satker PNPB menjadi BLU pada bulan Maret 2020, saat ini sedang dilakukan revisi terhadap DIPA PNPB menjadi DIPA BLU.

4. Manajemen Investasi Pusat

a) Penerusan Pinjaman

Sejak tahun 2017 Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara sudah tidak lagi menatausahakan penerusan pinjaman yang sumber pembiayaannya berasal dari Rekening Pembangunan Daerah (RPD).

b) Kredit Program

Berdasarkan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), penyaluran KUR di Provinsi Maluku Utara triwulan I tahun 2020 tercatat Rp107,461 miliar terdiri dari KUR Mikro dan ritel. Sektor perdagangan besar dan eceran mendominasi penyaluran sebesar 55,08 persen. Sektor pertanian dan perikanan masing-masing tersalur 8,58 persen dan 5,97 persen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa realisasi KUR di Provinsi Maluku Utara belum memperhatikan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang memiliki potensi tingginya risiko gagal bayar pada sektor tersebut. KUR di Provinsi Maluku Utara terkonsentrasi pada pelaku usaha yang berdomisili di Kota Ternate. Rendahnya penyaluran KUR di daerah lain mengindikasikan rendahnya akses perbankan pada wilayah tersebut.

Selain KUR, pemerintah juga menyediakan program pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Program ini dilaksanakan melalui lembaga keuangan bukan bank (pegadaian, PNM dan bahana). Total debitur UMi di Provinsi Maluku Utara sebanyak 27 orang dengan jumlah penyaluran sebesar Rp231 juta pada triwulan I tahun 2020.

C. Prognosis Realisasi APBN

Prognosis pendapatan dan belanja negara di Provinsi Maluku Utara diukur menggunakan pendekatan model *power* dan *cubic*. Melihat kinerja APBN selama tahun 2015 s.d 2020, maka realisasi pendapatan dan belanja negara masing-masing sampai akhir tahun 2020 diperkirakan sebesar Rp1.689,46 miliar dan Rp14.642,40 miliar. Perkiraan realisasi tersebut sudah disesuaikan dengan pagu anggaran setelah *refocusing* dan *realokasi* APBN akibat adanya pandemi Covid-19.



Tabel 2.2 Perkiraan Realisasi APBN Provinsi Maluku Utara s.d. Triwulan IV Tahun 2020 (miliar rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi Triwulan I		Perkiraan Realisasi s.d. Triwulan IV	
		Rp	% thd Pagu	Rp	% thd Pagu
Pendapatan Negara	2.253,82	430,42	19,10	1.689,46	74,96
Belanja Negara	13.903,22	2.830,72	20,36	14.642,40	105,32

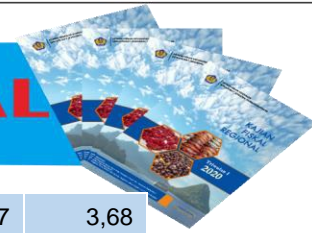
Sumber : Kanwil DJPb Prov. Maluku Utara, 2020 (diolah).

III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

Perkembangan realisasi APBD agregat dari seluruh pemerintah daerah di Maluku Utara hingga Triwulan I 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Realisasi APBD Provinsi Maluku Utara Triwulan I Tahun 2019 dan 2020 (miliar Rp)

Uraian	Triw. I 2019			Triw. I 2020		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
PENDAPATAN	12.414	2.088	16,82	12.719	1.797	14,13
PAD	1.155	42	3,64	1.475	57	3,89
Pajak Daerah	486	27	5,56	600	36	6,00
Retribusi Daerah	114	7	6,14	163	10	6,18
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10	-	-	9	6	59,18
Lain-Lain PAD yang Sah	543	8	1,47	702	6	0,82
Pendapatan Transfer	9.974	1.890	18,95	10.847	1.740	16,04
Transfer Pem. Pusat – Daper	9.718	1.878	19,32	9.564	1.730	18,08
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	256	12	4,69	1.007	10	1,01
Transfer Pemerintah Provinsi	176	12	6,82	277	-	-
Transfer Bantuan Keuangan	80	-	-	-	-	-
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	1.540	167	10,84	242	-	-
Pendapatan Hibah	205	-	-	242	-	-
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya	162	27	16,67	155	0	0
JUMLAH PENDAPATAN	12.414	2.088	16,82	12.719	1.797	14,13
BELANJA	12.951	1.369	10,57	12.141	1.288	10,61
Belanja Pegawai	3.938	656	16,66	3.738	648	17,34
Belanja Barang	3.133	304	9,70	3.624	329	9,09
Belanja Bunga	33	2	6,06	22	3	15,50
Belanja Subsidi	2	-	-	1	-	10,72
Belanja Hibah	376	54	14,36	673	85	12,59
Belanja Bantuan Sosial	47	5	10,64	28	3	9,84
Belanja Modal	3.900	224	5,74	4.016	203	5,05
Belanja Tidak Terduga	25	1	4,00	39	17	42,85



TRANSFER PEMERINTAH DAERAH	1.494	120	8,03	1.558	57	3,68
Transfer/Bagi Hasil Pendapatan	134	42	31,34	205	8	3,93
Transfer Bantuan Keuangan	1.360	77	5,66	1.353	49	3,64
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	14.445	1.489	10,31	13.699	1.345	9,82
SURPLUS/DEFISIT	(537)	719		(980)	452	(46,09)
PEMBIAYAAN NETTO	12.414	2.088	16,82	12.287	1.797	14,63
SILPA/(SIKPA)	1.155	42	3,64	11	501	4644,58

Sumber : LRA Kab/Kota/ Prov, Maluku Utara

Realisasi pendapatan daerah hingga akhir triwulan I 2020 mencapai 14,13 persen dari pagu pendapatan tahun 2020. Capaian tersebut lebih kecil dari tahun 2019 yang terealisasi sebesar 16,82 persen. Penurunan tersebut terjadi karena jumlah realisasi transfer DAU dan DAK tahun 2020 lebih kecil. Sementara belanja daerah meningkat tipis dari periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan tingkat penyerapan yang baru mencapai 10,61 persen, kinerja pemda perlu ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Maluku Utara dalam masa tanggap darurat corona.

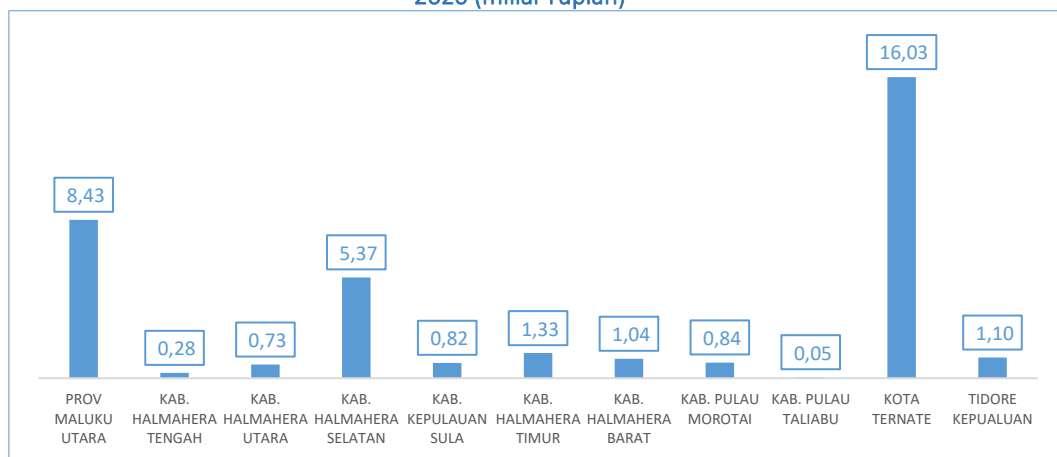
A. Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

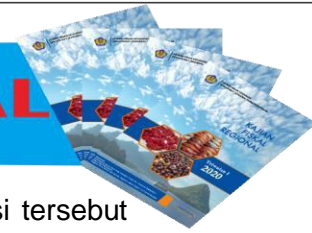
Realisasi PAD di Maluku Utara pada Triwulan I 2020 tercatat sebesar 3,89 persen dari total pagu tahun 2020. Kontribusinya terhadap total penerimaan hanya sebesar 3,19 persen. Hal ini menunjukkan tingkat kemandirian fiskal pemda di Maluku Utara masih rendah, sehingga pemda diharapkan lebih aktif dan kreatif dalam menggali sumber-sumber PAD. Berdasarkan komponen pembentuknya, pajak daerah berkontribusi sebesar 62,76 persen, retribusi daerah 17,57 persen serta penerimaan dari lain-lain PAD yang sah sebesar 10,02 persen. Sementara penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, tercatat belum terdapat realisasi.

a) Penerimaan Pajak Daerah

Grafik 3.1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/ Kota Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan I Tahun 2020 (miliar rupiah)



Sumber : LRA Kab/Kota/ Prov, Maluku Utara

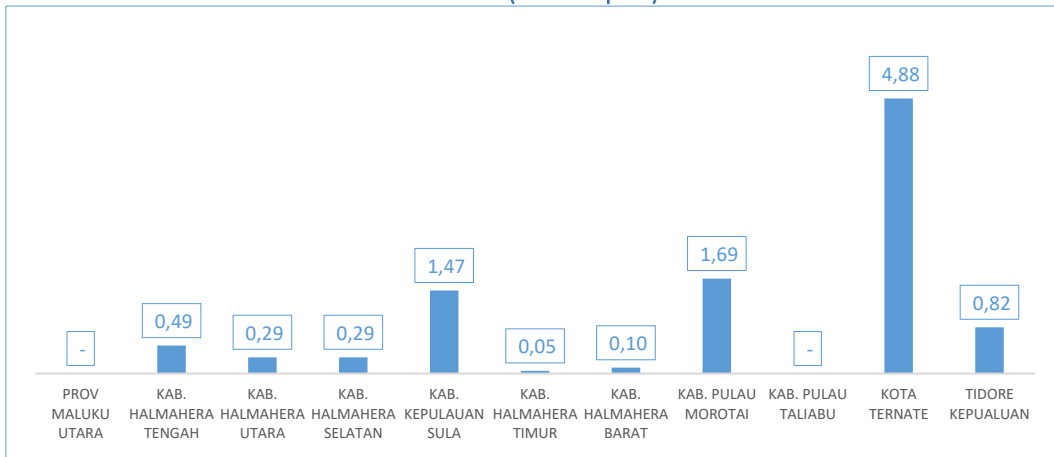


Realisasi pajak daerah mencapai 6 persen dari target tahun 2020, realisasi tersebut lebih tinggi dari realisasi tahun 2019 sebesar 5,56 persen. Kenaikan tersebut disebabkan karena penerimaan Provinsi dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor sudah tercatat sedangkan pada periode triwulan I tahun 2019 belum tercatat. Sementara untuk jenis pajak kabupaten/kota, sumbangan terbesar berasal dari pajak penerangan jalan yang terealisasi sebesar Rp13,09 miliar. Hal ini tidak lepas juga dari program PT. PLN yang berjanji akan menerangi seluruh desa di Maluku Utara pada tahun 2020 ini. Dipastikan jenis pajak ini akan terus meningkat, karena investasi listrik di wilayah timur membutuhkan dua sampai 3 miliar setiap desanya.

b) Penerimaan Retribusi Daerah

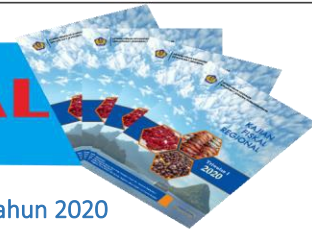
Penerimaan retribusi daerah hingga triwulan I 2020 mencapai 6,18 persen dari target yang ditetapkan. Realisasinya tersebut lebih tinggi dari realisasi tahun 2019. Hal ini disebabkan semakin intensifnya usaha pemda dalam menggali potensi-potensi pendapatan retribusi di daerahnya. Kenaikan penerimaan retribusi didorong meningkatnya retribusi izin mendirikan bangunan dan pelayanan Kesehatan. Jenis penerimaan ini, pencatatan pendapatannya oleh Pemprov Maluku Utara tidak lagi sebagai retribusi tapi masuk pada pos lain-lain PAD yang sah. Namun demikian, penerimaan layanan kesehatan masih menjadi peyumbang terbesar hingga 31,02 persen dari total retribusi.

Grafik 3.2 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten/ Kota Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan I Tahun 2020 (miliar rupiah)

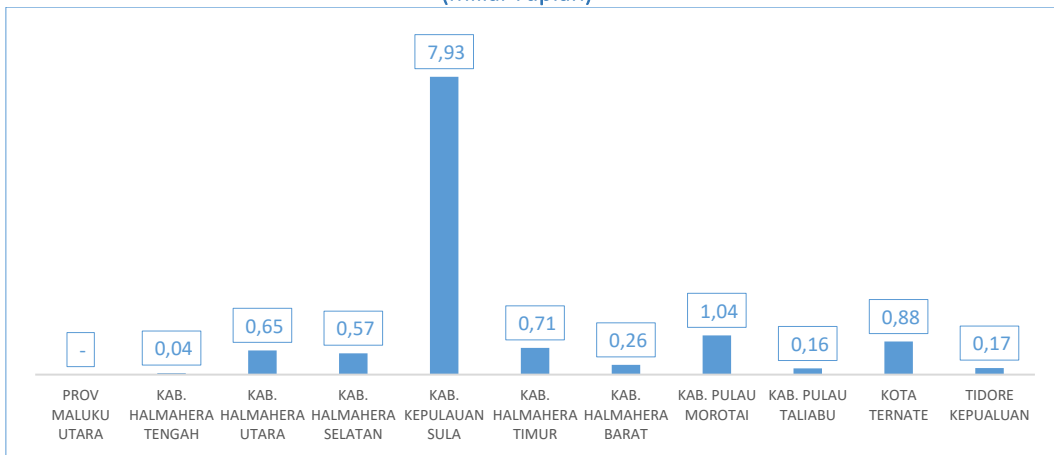


Sumber : LRA Kab/Kota/ Prov, Maluku Utara

c) Lain-Lain PAD yang Sah



Grifik 3.3 Realisasi Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan I Tahun 2020 (miliar rupiah)



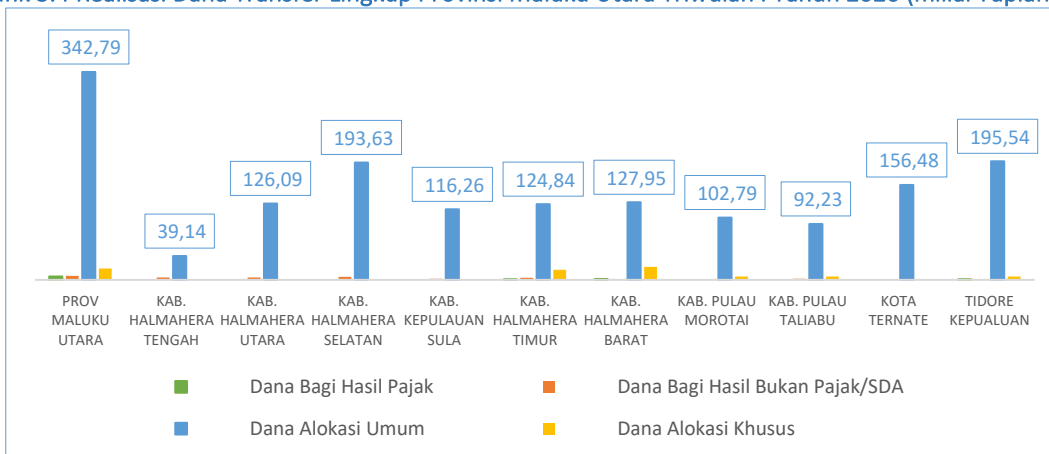
Sumber : LRA Kab/Kota/ Prov, Maluku Utara

Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang sah mencapai 0,82 persen dari pagu. Realisasi ini lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2019. Dari capaian tahun 2020 penerimaan terbesar dari jenis ini disumbang dari Lain-lain PAD yang Sah Lainnya dan Pendapatan dari Pengembalian. Jumlah Penerimaan Lain-Lain PAD yang sah diindikasikan belum mempertimbangkan pendapatan dari BLUD Rumah Sakit pada Kabupaten Halsel, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halut, dan Kabupaten Halbar akibat belum disahkannya SP3B.

2. Pendapatan Transfer

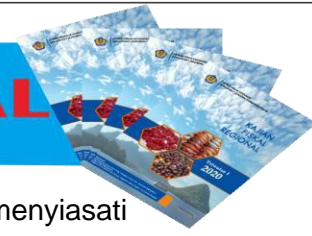
Realisasi pendapatan transfer di Maluku Utara hingga triwulan I 2020 mencapai 16,04% lebih rendah dari capaian tahun 2019 yang terealisasi 18,95%. Hal ini terjadi karena secara keseluruhan realisasi pendapatan transfer di Maluku Utara turun secara drastis. Kabupaten Halmahera Selatan menjadi daerah dengan pendapatan transfer terbesar karena memiliki wilayah yang terluas dengan jumlah penduduk dan desa terbanyak di Maluku Utara.

Grifik 3.4 Realisasi Dana Transfer Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan I Tahun 2020 (miliar rupiah)



Sumber : LRA Kab/Kota/ Prov, Maluku Utara

Rasio pendapatan transfer terhadap total pendapatan sendiri mencapai 96,8 persen. Artinya tingkat ketergantungan pemda di Maluku Utara terhadap pemerintah pusat masih cukup tinggi. Hanya pemda tetap perlu mewaspadaai sifat transfer DAU yang dinamis,



tergantung penerimaan netto dalam negeri. Pemerintah daerah juga perlu menyalurkan penurutan dana transfer (DAU dan DAK) akibat terjadinya pandemik Covid-19. Sehingga sudah semestinya pemda bekerja keras untuk mendongkrak pendapatan daerah.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

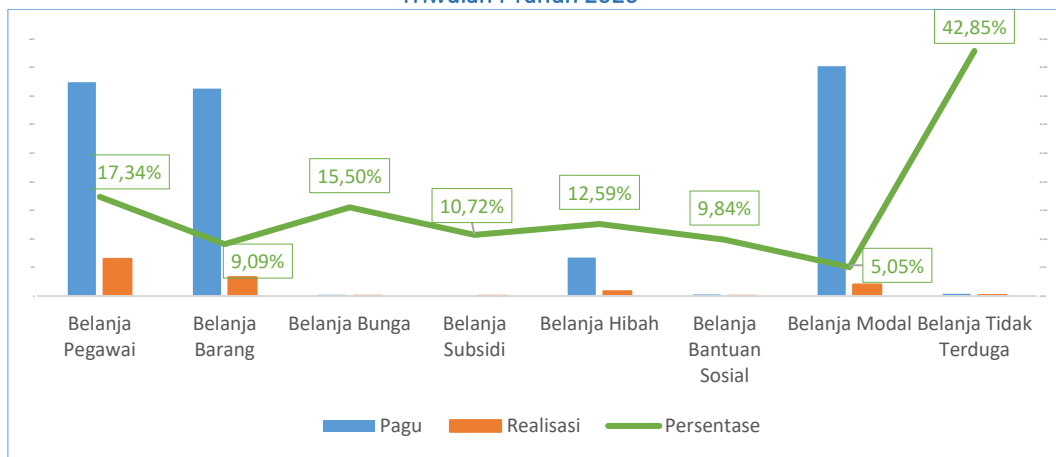
Pada triwulan Realisasi penerimaan ini menjadi komponen pendapatan dengan sumbangsih paling minim yang hanya tercapai Rp129 juta. Kontribusi tersebut berasal dari pendapatan lain-lain.

B. Belanja Daerah

1. Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal

Realisasi belanja tahun 2020 mencapai 10,61% dengan jumlah realisasi paling besar pada belanja pegawai sebesar 50,31% dari total belanja. Hal ini terlihat bahwa rata-rata pemda di Maluku Utara cenderung masih berfokus pada belanja pegawai. Hal ini sangat disayangkan karena pendapatan bersumber dari pendapatan transfer dalam bentuk DAU. Rasionalisasi belanja pegawai perlu dilakukan pemda untuk menyediakan ruang fiskal yang lebih memadai bagi belanja publik.

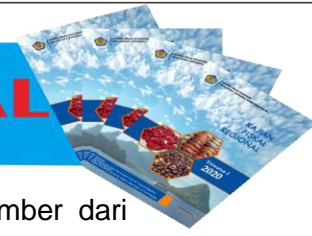
Grafik 3.5 Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan I Tahun 2020



Sumber : LRA Kab/Kota/ Prov, Maluku Utara

Untuk belanja barang penyerapannya mencapai 9,09 persen. Jenis belanja ini tergolong kurang produktif karena realisasi terbesar lebih dialokasikan untuk belanja perjalanan dinas dengan proporsi hingga 33,34 persen atau Rp109,84 miliar. Pemda diharapkan lebih proaktif melakukan efisiensi dengan selektif dalam perjalanan dinas serta mengurangi kegiatan konsinyering yang tidak perlu.

Sementara belanja modal yang diharapkan dapat memberikan *multiplier effect* di Maluku Utara, baru terserap 5,05 persen. Realisasinya lebih rendah dari kinerja tahun lalu. Hal tersebut disebabkan masih banyak pekerjaan yang belum selesai proses tender pada sejumlah pemda. Selain itu, belum tersalurkannya DAK Fisik dan menyebarnya pandemi

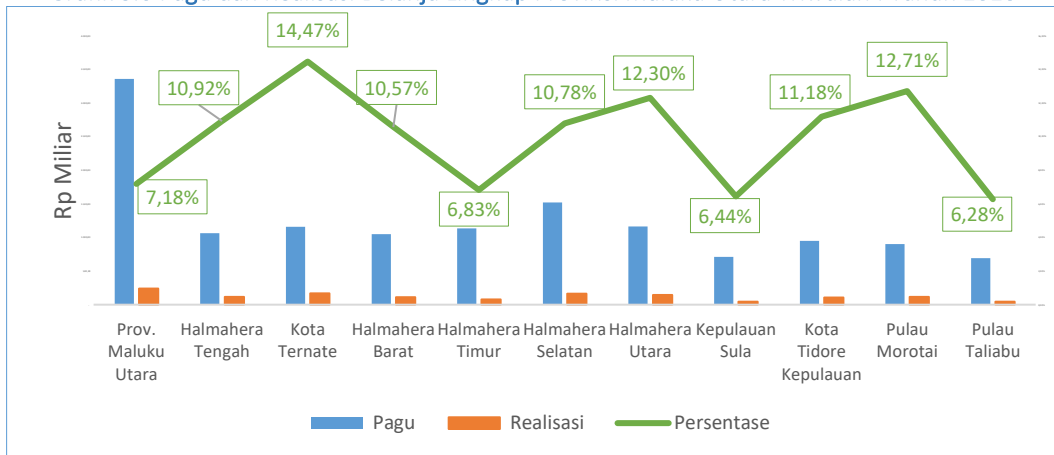


Covid-19 yang mengakibatkan belum terlaksananya proyek-proyek yang bersumber dari belanja modal di Maluku Utara.

2. Belanja Daerah Berdasarkan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Tingkat penyerapan belanja tertinggi terdapat di Kota Ternate mencapai 14,47 persen sedangkan realisasi pendapatan tertinggi terdapat di Kota Tidore Kepulauan mencapai 22,41 persen. Sementara Kabupaten Pulau Taliabu menjadi daerah dengan tingkat penyerapan paling rendah mencapai 6,28 persen. Hal ini akibat masih banyak belanja yang realisasinya nol. Masih terdapat juga Dana Desa yang belum tersalurkan atau terlambat salur.

Grafik 3.6 Pagu dan Realisasi Belanja Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan I Tahun 2020



Sumber : LRA Kab/Kota/ Prov. Maluku Utara

C. Prognosis Realisasi APBD

Melihat kinerja APBD dalam tiga tahun terakhir dan capaiannya hingga triwulan I 2020, realisasi pendapatan daerah hingga akhir tahun 2020 diperkirakan mencapai Rp11.142,79 miliar dari target pendapatan. Sementara realisasi belanja daerah diperkirakan mencapai 85,73 persen dari target yang akan ditetapkan atau mencapai Rp12.137,96 miliar. Dengan melihat kecenderungan capaian tahun-tahun sebelumnya, kemungkinan terjadi surplus di angka Rp95 miliar dengan catatan perhitungan ini belum memperhitungkan dampak pandemic Covid-19.

Tabel 3.2 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Maluku Utara s.d. Triwulan IV Tahun 2020 (miliar Rp)

Uraian	Pagu	Realisasi s.d. Triwulan I		Perkiraan Realisasi s.d. Triwulan IV	
		Rp	% Realisasi Terhadap Pagu	Rp	% Perkiraan Realisasi Terhadap Pagu
Pendapatan Daerah	12.719,68	1.797,05	14,63	11.535,48	90,69
Belanja Daerah	13.699,08	1.345,40	9,84	12.155,19	88,73
Surplus/Defisit	(980,01)	451,66	(32,42)	(66,54)	6,79

Sumber : LRA Kab/Kota/Prov. Maluku Utara



IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan keuangan konsolidasian (gabungan) dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam periode laporan tertentu. Angka-angka yang disajikan dalam tabel 4.1 meliputi realisasi pendapatan/belanja Pusat dan Daerah setelah melalui proses eliminasi sehingga terdapat beberapa perbedaan angka realisasi dengan yang dipaparkan pada bab-bab sebelumnya.

Tabel 4.1 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Maluku Utara Tw-I Tahun 2020 (miliar Rp)

Uraian	Triwulan I 2020			Triw I 2019	
	Pusat	Daerah	Konsolidasi	Kenaikan	Konsolidasi
Pendapatan Negara	430,43	57,39	487,81	3,03%	473,47
Pendapatan Perpajakan	357,49	36,02	393,51	6,74%	368,69
PNBP	72,94	21,37	94,31	30,91%	72,04
Hibah	0,00	0,00	0,00	-	-
Transfer*	1.739,66**	1.739,66*			
Belanja Negara	1.091,06	1.345,40	2.436,46	(5,43)%	2.576,23
Belanja Pemerintah	708,74	1.288,04	1.996,78	25,28%	1.593,83
Transfer*	2.121,98*	57,36	439,68	(55,24)%	982,40
Surplus/ (Defisit)	(660,64)	(1.288,01)	(1.948,65)	(51,09)%	(1.289,69)
Pembiayaan	0,00	(11,85)	(11,85)	(28,91)%	(16,67)
Penerimaan Pembiayaan Daerah	0,00	14,56	14,56	-	-
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	26,41	26,41	58,43%	16,67
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran	(660,64)	(1.299,86)	(1.960,50)	(54,00)%	(1.273,01)

Sumber: Kanwil DJPb Prov. Maluku Utara, 2020 (diolah)

*) Seluruh Pengeluaran Transfer pemerintah pusat dieliminasi dengan Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah

***) Penyesuaian terhadap pengakuan belanja transfer pada pemerintah pusat yang merupakan Pendapatan BA 099.05

B. Pendapatan Konsolidasian

Pendapatan Pemerintahan Umum (*General Government Revenue*) atau Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh pendapatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama. Pendapatan tersebut telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi).

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

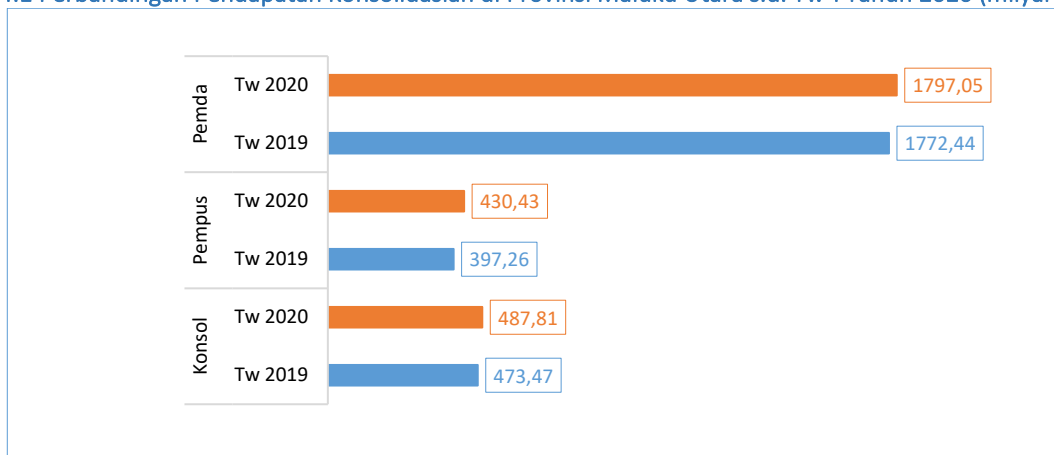
Pendapatan pemerintah konsolidasian terdiri dari penerimaan perpajakan, PNBP dan hibah. Total pendapatan konsolidasian pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Maluku Utara sampai dengan triwulan I tahun 2020 adalah sebesar Rp487,81 miliar. Pendapatan



tersebut mengalami kenaikan sebesar 3,03 persen dari triwulan I tahun 2019. Sebanyak Rp430,43 miliar merupakan pendapatan pemerintah pusat dan sisanya Rp1.797,05 miliar pendapatan pemerintah daerah. Pendapatan pemerintah pusat tersebut selanjutnya akan didistribusikan kepada pemerintah daerah berupa dana transfer.

Jumlah pendapatan pemerintah pusat ini mengalami kenaikan dari yang sebelumnya pada triwulan I tahun 2019 hanya sebesar Rp397,26 miliar. Kenaikan ini juga dialami oleh pendapatan pemerintah daerah. Pendapatan pemerintah daerah tetap mengalami kenaikan walaupun tidak ada realisasi pendapatan hibah di triwulan I tahun 2020. Sedangkan PNPB juga mengalami kenaikan sebesar 30,91 persen. Upaya peningkatan pendapatan baik pemerintah pusat maupun daerah mutlak perlu dilakukan supaya dapat membangun ketahanan fiskal daerah yang berkelanjutan.

Grafik 4.1 Perbandingan Pendapatan Konsolidasian di Provinsi Maluku Utara s.d. Tw-I Tahun 2020 (milyar Rp)

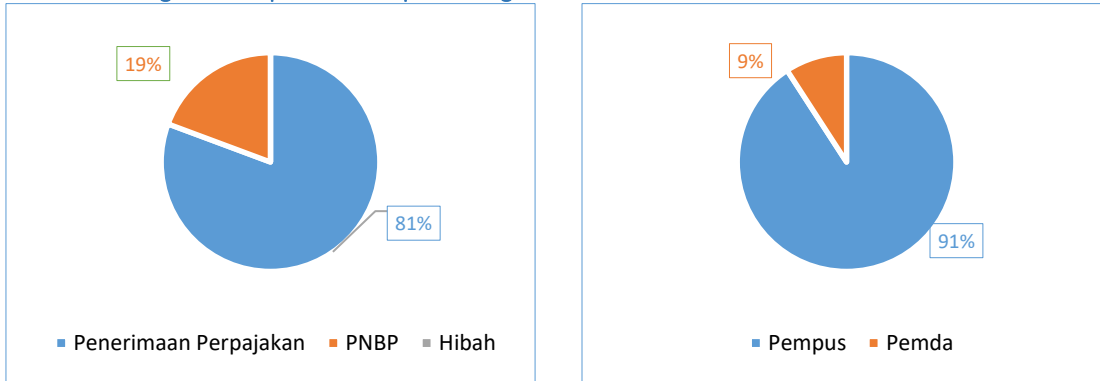


Sumber: Kanwil DJPb Prov. Maluku Utara, 2019 (diolah)

Pada triwulan I tahun 2020 pendapatan pemerintah konsolidasian didominasi oleh penerimaan perpajakan konsolidasian sebesar Rp393,51 miliar atau 80,67 persen. PNPB hanya memberikan kontribusi terhadap pendapatan pemerintah konsolidasian sebesar 19,33 persen sedangkan hibah tidak memberikan kontribusi sama sekali terhadap pendapatan pemerintah konsolidasian. Penerimaan perpajakan konsolidasian sebesar 91 persen merupakan penerimaan perpajakan pemerintah pusat dan sisanya 9 persen merupakan penerimaan perpajakan pemerintah daerah.



Grafik 4.2 Diagram Komposisi Pendapatan Negara Konsolidasian Provinsi Maluku Utara s.d. Tw-I 2020

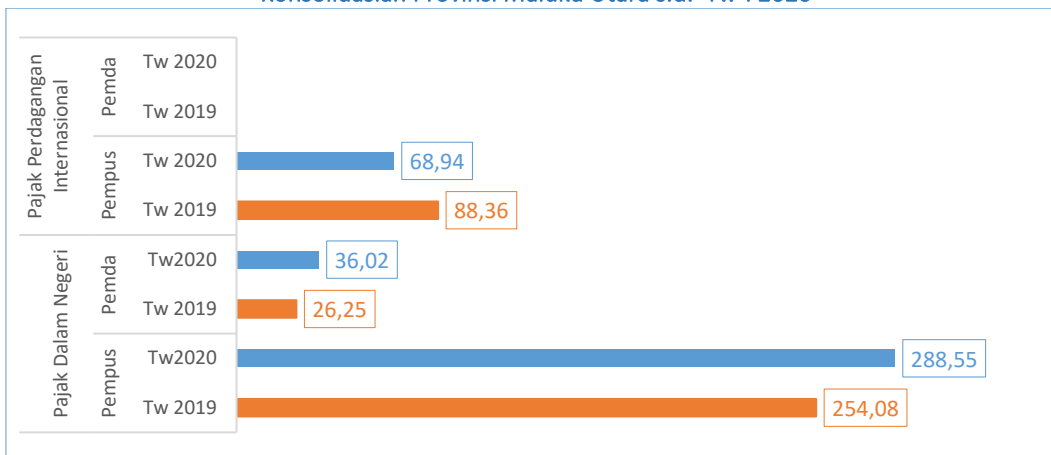


Sumber: Kanwil DJPb Prov. Maluku Utara, 2020 (diolah)

2. Analisis Perubahan

Penerimaan perpajakan konsolidasian mencapai Rp393,51 miliar mengalami kenaikan sebesar 6,74 persen dari triwulan I tahun 2019. Penerimaan perpajakan ini terdiri dari penerimaan pajak dalam negeri sebesar Rp324,57 miliar dan penerimaan pajak perdagangan internasional Rp68,94 miliar. Sebesar 73,33 persen dari penerimaan pajak dalam negeri tersebut merupakan penerimaan dari pemerintah pusat dan sisanya sebesar 26,67 persen merupakan penerimaan dari pemerintah daerah. Penerimaan pajak perdagangan internasional seluruhnya merupakan penerimaan dari pemerintah pusat sebesar Rp68,94 miliar atau 17,52 persen dari total penerimaan perpajakan konsolidasian.

Grafik 4.4 Perbandingan Penerimaan Perpajakan Pempus dan Pemda terhadap Penerimaan Perpajakan Konsolidasian Provinsi Maluku Utara s.d. Tw-I 2020



Sumber: Kanwil DJPb Prov. Maluku Utara, 2019 (diolah)

3. Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan Konsolidasian

Pertumbuhan ekonomi yang positif akan mendorong kenaikan penerimaan negara di sektor perpajakan. Selain perpajakan, kenaikan penerimaan dari pemanfaatan SDA, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, PNBP lainnya, pendapatan BLU dan sumber lainnya juga akan mempengaruhi penerimaan untuk sektor PNBP.



Tabel 4.2 Tabel Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pempus dan Pemda di Wilayah Provinsi Maluku Utara Tw-I 2020 dan 2019 (dalam miliar rupiah)

Uraian	Triwulan I 2019		Triwulan I 2020	
	Realisasi	Rasio	Realisasi	Rasio
Penerimaan Perpajakan	368,69	47,88%	393,51	128,60%
PNBP	72,04	9,36%	94,31	30,82%
Total	473,47	61,49%	487,81	159,42%
PDRB/Pertumbuhan Ekonomi (harga berlaku*)	7,70		3,06	

Sumber: Kanwil DJPb Prov. Maluku Utara dan BPS Malut, 2020 (diolah)

Selama triwulan I tahun 2020, PDRB Provinsi Maluku Utara mencapai 3,06 persen dan mengalami laju pertumbuhan sebesar 3,06 persen (*y-on-y*). Sejalan dengan perekonomian yang tumbuh, rasio pendapatan konsolidasian terhadap PDRB mengalami kenaikan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pendapatan konsolidasian sudah mampu menaikkan rasio pendapatan konsolidasian terhadap PDRB. Antara pendapatan konsolidasian dengan pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi yang sangat kuat sehingga ketika pendapatan konsolidasian naik maka pertumbuhan ekonomi secara otomatis juga akan naik begitu sebaliknya.

C. Belanja Konsolidasian

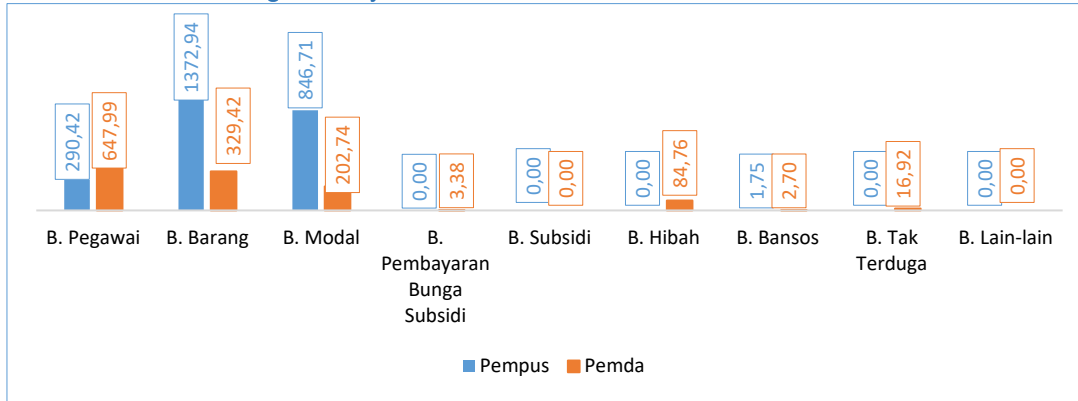
1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Belanja negara konsolidasian sampai dengan triwulan I tahun 2020 mencapai Rp2.436,46 miliar. Belanja ini mengalami penurunan sebesar 5,43 persen terhadap triwulan I tahun 2019. Walaupun belanja konsolidasian mengalami penurunan, akan tetapi belanja pada pemerintah pusat mengalami kenaikan sebesar 13,78 persen. Belanja pemerintah daerah mengalami kenaikan yang tidak signifikan sebesar 0,25 persen dibanding triwulan I tahun 2019. Belanja negara konsolidasian didominasi oleh belanja pemerintah daerah dengan nilai Rp1.288,04 miliar atau hampir mencapai 64,50 persen dari total belanja.

Belanja pemerintah pusat/daerah konsolidasian didominasi oleh belanja pegawai. Belanja pegawai memiliki nilai belanja tertinggi dibandingkan dengan belanja lain di pemerintah pusat dan daerah yang mencapai 40,98 persen dan 50,31 persen nilainya dari masing-masing total belanja pemerintah pusat dan daerah yang dimana pada pemerintah daerah digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan para pegawai yang ada di daerah. Besaran belanja pegawai pemerintah daerah meningkat yang semula hanya 46,83 persen dari triwulan I tahun 2019. Belanja pegawai perlu mendapat perhatian khusus dikarenakan mendominasi untuk pengeluaran belanja pemerintah daerah. Pemerintah daerah di Provinsi Maluku Utara perlu mencontoh pola belanja pemerintah pusat yang didominasi belanja barang. Hal tersebut karena mengingat belanja barang merupakan salah satu katalisator perekonomian dan mampu memberikan manfaat secara nyata dan jangka panjang dalam pertumbuhan ekonomi di daerah. Sedangkan belanja pegawai lebih memberikan dampak nyata untuk pribadi masyarakat itu sendiri.



Grifik 4.5 Perbandingan Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Maluku Utara Triwulan III 2019

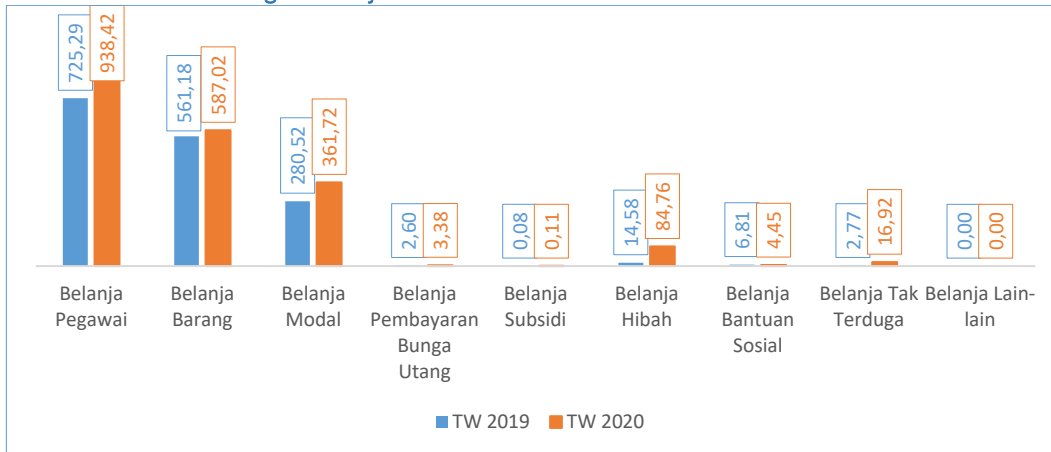


Sumber: Kanwil DJPb Prov. Maluku Utara, 2020 (diolah)

2. Analisis Perubahan

Belanja konsolidasian triwulan I tahun 2020 rata-rata mengalami kenaikan yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan triwulan I tahun 2019. Belanja bantuan sosial satu-satunya belanja yang mengalami penurunan yakni sebesar 34,66 persen dari triwulan I tahun 2019. Hal ini diindikasikan karena belanja bantuan sosial belum sepenuhnya masuk dalam catatan pada triwulan I ini.

Grifik 4.6 Perbandingan Belanja Konsolidasian Maluku Utara Triwulan I 2019 dan 2020

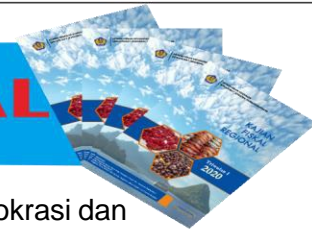


Sumber: Kanwil DJPb Prov. Maluku Utara, 2020 (diolah)

Belanja pemerintah pusat mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 58,71 persen untuk belanja modal. Kenaikan ini disebabkan karena adanya permintaan tinggi pada pembuatan sertifikat tanah, upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis, belanja penambahan nilai peralatan dan mesin, bahan baku gedung dan bangunan, perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan, perjalanan jalan dan jembatan, perjalanan jaringan, belanja penambahan nilai jaringan dan belanja jalan, irigasi dan jaringan untuk pencatatan jalan dan irigasi.

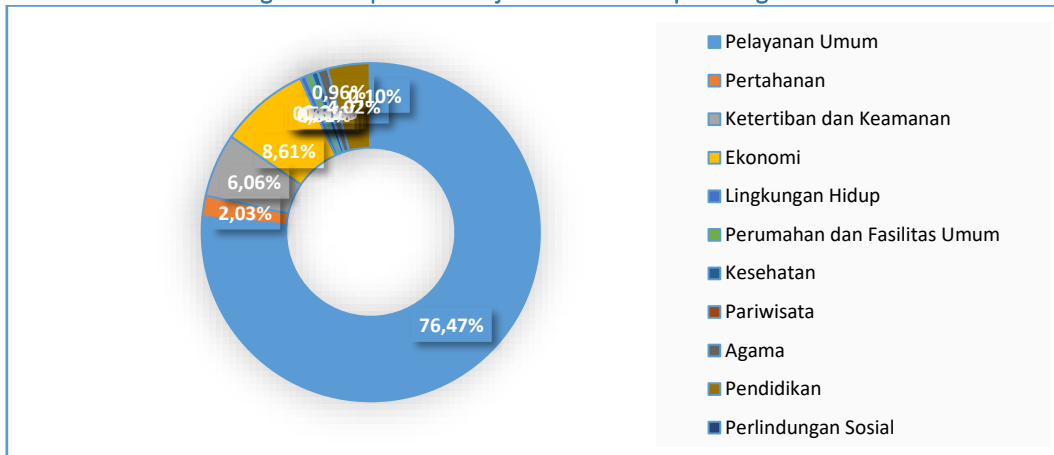
3. Analisis dampak kebijakan fiskal kepada indikator ekonomi regional

Belanja fungsi konsolidasian didominasi oleh belanja fungsi pelayanan umum dengan proporsi sebesar 76,47 persen dari 11 belanja fungsi yang ada. Belanja fungsi pelayanan



umum menunjukkan belanja pemerintah yang masih didominasi untuk keperluan birokrasi dan pelayanan pemerintahan. Belanja fungsi pariwisata merupakan belanja fungsi konsolidasian terendah yang hanya mencapai 0,01 persen dari total belanja fungsi konsolidasian yang ada.

Grafik 4.7 Diagram Komposisi Belanja Konsolidasian per Fungsi Triwulan I 2020



Sumber: Kanwil DJPb Prov. Maluku Utara, 2019 (diolah)

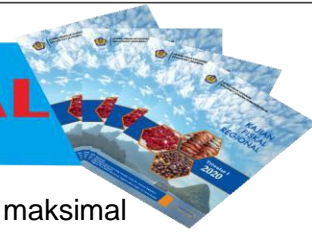
Belanja fungsi pemerintah pusat didominasi oleh belanja fungsi pelayanan umum dimana proporsinya mencapai 76,47 persen. Belanja fungsi ini disebabkan oleh belanja barang yang terlalu besar di pemerintah pusat. Belanja fungsi pemerintah daerah tertinggi ialah belanja fungsi pelayanan umum yang mencapai 40,90 persen dari total belanja dan didominasi oleh urusan administrasi pemerintahan.

Grafik 4.8 Diagram Komposisi Belanja Pemerintah Pusat per Fungsi Triwulan I 2020



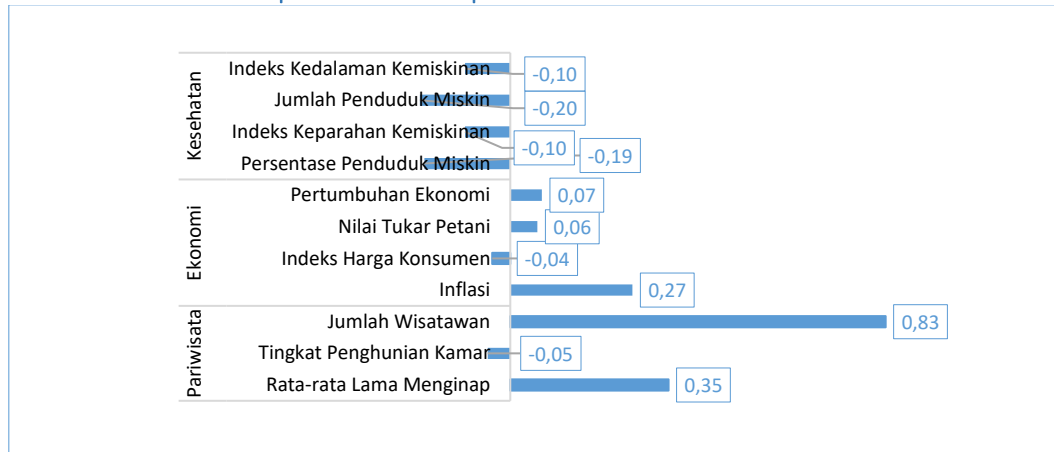
Sumber: Kanwil DJPb Prov. Maluku Utara, 2020 (diolah)

Belanja fungsi ekonomi memiliki hubungan positif dengan indikator ekonomi berupa pertumbuhan ekonomi, hal tersebut terkonfirmasi juga dengan meningkatnya nilai tukar petani, indeks harga konsumen dan inflasi. Belanja fungsi kesehatan memiliki hubungan yang sangat lemah dengan indikator kemiskinan meliputi jumlah penduduk miskin, indeks keparahan kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan dan persentase penduduk miskin. Pemerintah perlu melakukan evaluasi agar belanja yang telah dikeluarkan dapat mengurangi ketimpangan yang ada.



Sektor pariwisata yang merupakan sektor potensial belum dikelola secara maksimal oleh pemerintah daerah. Keadaan ini diperparah dengan adanya pandemi Covid-19 yang membuat masyarakat tidak bisa bepergian untuk menikmati pariwisata yang ada di Provinsi Maluku Utara. Pemerintah sepatutnya perlu memperhatikan sektor ini sebagai pendorong perekonomian wilayah. Ke depannya sektor ini diharapkan mampu berkembang lebih baik setelah pandemi Covid-19 berakhir sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran yang banyak terjadi akibat adanya pandemi tersebut.

Grafik 4.10 Dampak Fiskal terhadap Perekonomian Maluku Utara Triwulan I 2020



Sumber: BPS Prov. Maluku Utara, 2020 (diolah)

V. BERITA/ ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH

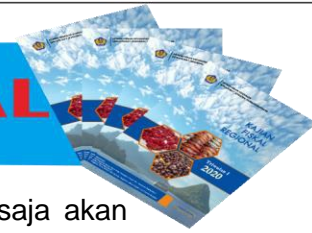
Bahasan berita/ isu fiskal regional terpilih mengulas Pembangunan Smelter terhambat, Pertumbuhan Sektor Pertambangan turun dan Upaya Peningkatan Produktivitas Pangan.

A. Pembangunan Smelter terhambat, Pertumbuhan Sektor Pertambangan turun

Capaian pertumbuhan ekonomi triwulan I-2020 Provinsi Maluku Utara mengalami penurunan dibanding pertumbuhan ekonomi triwulan I-2019 (*y-on-y*) sebesar 7,65 persen. Perlambatan tersebut sangat dipengaruhi pertumbuhan dari lapangan usaha pertambangan yang turun 6,22 persen (*y-on-y*). Beberapa perusahaan yang diharapkan sudah berproduksi, saat ini masih dalam tahap pengerjaan konstruksi pembangunan smelter baru.

Menurut Menteri ESDM, telah terjadi keterlambatan pembangunan smelter karena masalah pendanaan, aturan daerah dan pasokan listrik. Untuk Provinsi Maluku Utara, Kementerian ESDM menyebutkan bahwa pembangunan smelter di Halmahera Timur oleh PT Aneka Tambang Tbk seharusnya selesai bulan November 2019, namun mundur sampai Juni 2020. Keterlambatan tersebut disebabkan adanya keterlambatan pasokan listrik oleh PT PLN.² Hal ini tentu saja harus menjadi perhatian pemerintah agar segera memfasilitasi

² <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200123150347-4-132214/terganjal-pembiayaan-16-proyek-smelter-nikel-macet> diakses tanggal 10 Mei 2020.



penyelesaian permasalahan tersebut. Disamping itu, Pandemi COVID-19 tentu saja akan mempengaruhi pembangunan smelter dan menurunkan pertumbuhan sektor pertambangan.

B. Upaya Peningkatan Produktivitas Pangan

Berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Maluku Utara tahun 2019, terdapat 3 Kabupaten dan 23 Kecamatan yang masuk dalam kategori rentan pangan di Provinsi Maluku Utara. Status ini menjadikan pemangku kepentingan terkait untuk bersinergi agar mampu meningkatkan status dari daerah rawan pangan menjadi tahan pangan.³

Upaya peningkatan produktivitas pangan diharapkan akan menggenjot pertumbuhan sektor pertanian yang masih menjadi kontributor tertinggi dalam struktur PDRB Maluku Utara. Selain itu, pertumbuhan sektor pertanian diharapkan dapat diimbangi oleh turunnya biaya produksi yang ditanggung petani agar NTP Maluku Utara naik menjadi di atas 100 (per Maret 2020 NTP Maluku Utara sebesar 98,33). Dampak lain ialah prospek menjadi petani meningkat sehingga mampu mengurangi jumlah pengangguran dan mengurangi angka kemiskinan di Maluku Utara.

³ https://www.timesindonesia.co.id/read/news/249759/malukutimes.com_ diakses tanggal 10 Mei 2020



Lampiran I. Perhitungan Nilai Prognosis APBN

Prognosis Pendapatan Negara: Menggunakan Model "Power"

Model Summary

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
.942	.887	.880	.244

The independent variable is triwulan.

ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	7.468	1	7.468	125.837	.000
Residual	.950	16	.059		
Total	8.417	17			

The independent variable is triwulan.

Coefficients

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
In(triwulan)	1.185	.106	.942	11.218	.000
(Constant)	326.817	32.919		9.928	.000

The dependent variable is ln(pendapatan).

Nilai Prognosis Pendapatan Negara: $\widehat{Y}_t = \beta_0 T^{\beta_1} = 326,817 * (4^{1,185}) = 1689,4515$

Prognosis Belanja Negara: Menggunakan Model "Cubic"

Model Summary

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
.975	.951	.940	1192.893

The independent variable is triwulan.



ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	386397120.676	3	128799040.225	90.513	.000
Residual	19921917.984	14	1422994.142		
Total	406319038.659	17			

The independent variable is triwulan.

Coefficients

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
triwulan	9869.868	7472.529	2.424	1.321	.208
triwulan ** 2	-2490.505	3312.830	-3.102	-.752	.465
triwulan ** 3	314.282	440.097	1.682	.714	.487
(Constant)	-5103.039	4830.849		-1.056	.309

Nilai Prognosis Belanja Negara: $\widehat{Y}_t = \beta_0 + \beta_1 T + \beta_2 T^2 + \beta_3 T^3 =$
 $-5103,039 + (9869,868 * (4^1)) + (-2490,505 * (4^2)) + (314,282 * 43 = 14642,401$



KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU UTARA

Jl. Jati Lurus No. 254 Ternate

Telepon (0921) 311178

Fax (0921) 311179

Email : kanwil.ternate@gmail.com

Website : www.djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/malut